

**INDEPENDENSI FUNGSI PENGAWASAN MEDIA MASSA TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
(Studi pada Radar Lampung Media Grup)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SEFTIA ZEUDISWARA SIMANGUNSONG  
NPM 2216021123**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **INDEPENDENSI FUNGSI PENGAWASAN MEDIA MASSA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Radar Lampung Media Grup)**

**Oleh**

**Seftia Zeudiswara Simangunsong**

Media massa sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Radar Lampung Media Grup sebagai media lokal di Lampung, menjalankan fungsi tersebut melalui pemberitaan terkait kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dengan mekanisme editorial berlapis dan menjaga akurasi informasi sebagai bagian dari penyajian informasi yang bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi fungsi pengawasan Radar Lampung Media Grup terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori independensi media oleh Denis McQuail (1992) yang meliputi keberadaan opini, ketiadaan personalisasi, ketiadaan sensasionalisme, ketiadaan stereotip, ketiadaan juxtaposition (penyandingan) dan linkage (pengaitan), serta akurasi dalam pemberitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi fungsi pengawasan Radar Lampung belum diimplementasikan secara optimal pada indikator ketiadaan personalisasi dan ketiadaan sensasionalisme, yang ditandai oleh kecenderungan pemberitaan bersifat informatif dan belum mendalami serta menindaklanjuti isu secara kritis, sehingga fungsi pengawasan masih bersifat informatif dan belum sepenuhnya evaluatif dalam mendorong akuntabilitas pemerintah provinsi.

**Kata Kunci:** Independensi Media, Fungsi Pengawasan, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Radar Lampung Media Grup

## **ABSTRACT**

### **THE INDEPENDENCE OF MASS MEDIA OVERSIGHT FUNCTION ON THE ACCOUNTABILITY OF THE LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT'S PERFORMANCE (A Study at Radar Lampung Media Group)**

**By**

**Seftia Zeudiswara Simangunsong**

*The Mass media, as the fourth pillar of democracy, plays a crucial role in overseeing government administration as stipulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. Radar Lampung Media Group, as a local media outlet in Lampung, carries out this function through reporting on the performance of the Lampung Provincial Government by implementing a multi-layered editorial mechanism and maintaining the accuracy of information as part of responsible journalism. This study aims to analyze the independence of the supervisory function of Radar Lampung Media Group in relation to the accountability of the Lampung Provincial Government's performance. It employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The data analysis refers to Denis McQuail's (1992) theory of media independence, which includes the presence of opinion, the absence of personalization, the absence of sensationalism, the absence of stereotyping, the absence of juxtaposition and linkage, as well as accuracy in reporting. The findings indicate that the independence of Radar Lampung's supervisory function has not been optimally implemented, particularly in the aspects of the absence of personalization and sensationalism. This is reflected in the tendency of the news coverage to remain primarily informative, lacking deeper exploration and critical follow-up of issues. As a result, the supervisory function tends to be informative rather than fully evaluative in promoting the accountability of the provincial government.*

**Keywords:** *Media Independence, Oversight Function, Regional Government Accountability, Radar Lampung Media Group*

**INDEPENDENSI FUNGSI PENGAWASAN MEDIA MASSA TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
(Studi pada Radar Lampung Media Grup)**

Oleh

**SEFTIA ZEUDISWARA SIMANGUNSONG**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

**: INDEPENDENSI FUNGSI PENGAWASAN  
MEDIA MASSA TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG  
(Studi pada Radar Lampung Media Grup)**

Nama Mahasiswa

**: Seftia Zeudiswara Simangunsong**

Nomor Pokok Mahasiswa

**2216021123**

Program Studi

**: Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Himawan Indrajat, S.I.P., M.Si.  
NIP. 198307272009121009**

**2. Ketua Ilmu Pemerintahan**

  
**Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.  
NIP. 197106042003122001**

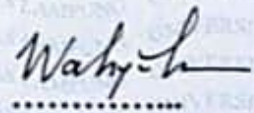
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**



**Penguji Utama : Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 197608212000032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Maret 2026**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 10 Maret 2026  
Yang Membuat Pernyataan



Seftia Zeudiswara Simangunsong  
NPM. 2216021123

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Seftia Zeudiswara Simangunsong lahir di Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, pada 6 April 2004. Penulis merupakan anak kesembilan dari sembilan bersaudara, dari pasangan Mangoloi Simangunsong (Mendiang) dan Roside Nababan. Pendidikan formal penulis dimulai di TK PAUD Lumban Bulbul dan diselesaikan pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 174550 Lumban Bulbul hingga lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Balige hingga lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Balige dan diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada program pendidikan Strata Satu (S1). Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi. Penulis pernah menjabat sebagai anggota staf bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di BEM FISIP 2024 dan BEM Universitas Lampung 2024. Selain itu, penulis juga aktif di organisasi kerohanian PDO FISIP UNILA serta menjadi pengurus UKM Zoom/Fotografi UNILA pada 2025. Di luar kampus, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Padang Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, serta mengikuti program riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada 2024. Pada 2025, penulis juga melaksanakan MBKM Magang di media massa Radar Lampung TV. Seluruh aktivitas akademik dan organisasi yang dijalani penulis dilandasi oleh motivasi untuk mengembangkan kemampuan diri, memperluas wawasan keilmuan, serta meningkatkan kapasitas profesional. Kegiatan-kegiatan tersebut juga menjadi sarana penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni sebagai bentuk pembelajaran, penciptaan karya, dan pengabdian kepada masyarakat, yang senantiasa mendorong penulis untuk menjadi insan akademik yang aktif, kreatif, dan berkontribusi nyata.

## **MOTTO**

“Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya!”

**(1 Korintus 9:24)**

*“I know that I know nothing. True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us.”*

(Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Kebijaksanaan sejati datang kepada kita ketika kita menyadari betapa sedikitnya yang kita pahami tentang kehidupan, diri kita sendiri, dan dunia di sekitar kita.)

***(Socrates)***

“Teruslah berjalan seolah langkahmu tidak pernah dipatahkan, tetaplah bersyukur seolah harapanmu tidak pernah dikecewakan.”

**(Seftia Zeudiswara Simangunsong)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis memanjatkan puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih penyertaan-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini bukanlah semata-mata hasil dari kekuatan pribadi, melainkan buah dari pertolongan Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan penulis dalam setiap tahap perjuangan, hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Dengan kerendahan dan ketulusan hati, karya ini penulis persembahkan kepada:

### **Kedua orang tuaku tercinta**

Mangoloi Simangunsong (Mendiang) & Roside Nababan.

Telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan, serta doa yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas cinta, dan pengorbanan yang diberikan sejak masa kecil hingga penulis berada di titik ini, baik yang senantiasa hadir maupun yang telah berpulang.

### **Saudara-saudaraku**

David, Rentana, Relawati, Todoramot, Irfan, Dion, Forda,  
dan seluruh keluarga besar Pomparan Op. Pardamean.

Yang selalu hadir melalui dukungan, motivasi, dan kebersamaan, serta menjadi penguat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, berkat, dan penyertaan-Nya yang senantiasa menyertai. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi dari keluarga serta orang-orang terkasih, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Independensi fungsi pengawasan media massa terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Lampung (Studi pada Radar Lampung Media Grup)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN.Eng., Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, atas perhatian, bimbingan, serta arahan yang diberikan, dan atas motivasi beliau dalam mengutamakan kepentingan mahasiswa selama perkuliahan.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.I.P., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas segala waktu dan kesempatan atas kesabaran, arahan, dan dukungan yang senantiasa diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan Bapak, agar bapak dan keluarga senantiasa bersukacita dan berkat yang melimpah.
6. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si., dosen penguji skripsi. Terimakasih atas waktu, kritik, saran, serta masukan yang konstruktif demi penyempurnaan

skripsi ini. Segala nasehat yang telah Ibu berikan kepada, kiranya menjadi bekal kepada penulis untuk masa depan. Kiranya Tuhan memberkati segala langkah Ibu dan keluarga.

7. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D., selaku Dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas segala nasihat dan kesediaan dalam mengupayakan kebutuhan penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas ilmu, pengalaman, dan pembelajaran berharga yang telah diberikan selama masa studi penulis.
9. Seluruh keluarga besar Radar Lampung Media Grup yang telah memberikan kesempatan, ilmu dan pengalaman kepada penulis untuk melakukan program magang pada divisi Televisi dan juga bantuannya dalam memberikan data untuk keperluan penulis skripsi.
10. Keluarga besar Op. Pardamean yang memberikan dukungan selama perkuliahan, terutama untuk Ibu penulis yang sudah memberikan gambaran utuh bagaimana ibu yang sempurna. Terimakasih atas motivasi dan doa-doa yang ibu berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahannya.
11. Untuk sahabatku, Emi Geloriani Br. Tarigan, yang selama ini menemani langkah dalam perkuliahan. Terimakasih atas luang yang diberikan dalam suka maupun duka.
12. Untuk sahabat dan rekan-rekanku kepengurusan Arion PDO Fisip tahun 2023, Berkat, Ivana, Indah, Devi, Emi, Hana, Hotdiana, Bastian, Joy, Bernadust, Jean, Luis. Terimakasih telah menjadi keluarga di perantauan yang tidak pernah lelah memberikan perhatian, canda dan tawa semasa awal perkuliahan.
13. Terimakasih kepada sahabat lama ku yang dari SMP hingga saat ini, yang tidak pernah lelah menanyakan kabar walau terpisah jarak, Imel Fitaloca Tambunan dan Paula Refina Napitupulu. Begitu juga dengan guru SMP, Pak Ponto, terimakasih yang selalu menjadi sumber motivasi hingga penulis masuk dalam perguruan tinggi, dan teman SMP yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
14. Terimakasih kepada seluruh teman dan adik-adik Fisip, Unila, Desmy, Rona, Suci, Anissa, Hotmaida, Marta, Zefanya, Cukup, Matteo, Dentry dan teman teman lainnya yang tidak dapat saya ucapkan satu-persatu, terimakasih telah

membersamai hingga skripsi ini selesai, hanya Tuhan yang dapat membalas segala kebaikan kalian.

15. Untuk sahabat, rekan KKN desa Padang Ratu, Lampung Utara. Dhaniella, Shobbah, Carissa, Vika, Tasya, Novardo, Marsyanda dan rekan lainnya. Terimakasih karena hingga pada akhir masa KKN masih tetap ada menjadi tempat cerita dan teman untuk sejenak melupakan beban.
16. Dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk untuk penulis selama masa perkuliahan yang belum saya sebutkan satu-persatu. Kiranya Tuhan membalas seluruh kebaikan dalam bentuk kesehatan, rezeki, sukacita maupun dalam bentuk spesifik yang kalian inginkan.
17. Untuk diri sendiri, Seftia Zeudiswara Simangunsong. Terimakasih telah menjadi manusia kuat dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Lanjutkan perjalananmu sesuai dengan apa yang telah menjadi rencanamu selama ini. Tetapi tetap berikan ruang ikhlas ketika semuanya tidak sejalan dengan maumu. Karena rancangan Tuhan lah yang terjadi dan itu rancangan damai sejahtera.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, rahmat, dan keberkahan bagi kita semua, serta membimbing setiap langkah kita untuk kebaikan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat, menjadi sumber ilmu, dan inspirasi bagi seluruh pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Maret 2026  
Penulis,

Seftia Zeudiswara Simangunsong

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Media Sebagai Pilar Keempat Demokrasi .....	11
2.2 Independensi Fungsi Media Massa .....	13
2.3 Akuntabilitas Pemerintahan Daerah .....	16
2.3.1 Konsep Akuntabilitas dalam Pemerintahan Daerah .....	16
2.3.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik ....	18
2.4 Pengawasan Media Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .....	20
2.5 Teori Independensi Media .....	23
2.6 Kerangka Pemikiran .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	28
3.2 Lokasi Penelitian .....	29
3.3 Fokus Penelitian .....	30
3.4 Penentuan Informan .....	31
3.5 Sumber Data .....	32
3.5.1 Data Primer .....	32
3.5.2 Data Sekunder .....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6.1 Observasi .....	33
3.6.2 Wawancara .....	34
3.6.3 Dokumentasi .....	35
3.7 Teknik Analisis Data .....	36
3.8 Teknik Keabsahan Data .....	37
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>39</b>
4.1 Independensi Media Indonesia dan Kode Etik Jurnalistik .....	39
4.2 Profil Radar Lampung Media Grup .....	41
4.2.1 Radar Lampung.co.id .....	43

4.2.2 Radar Lampung TV .....	46
4.2.3 Radar Lampung Surat Kabar Harian.....	50
4.2.4 Radar Lampung Riset dan Data .....	54
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Hasil Analisis Independensi Fungsi Pengawasan Radar Lampung.....	57
5.1.1 Keberadaan Opini.....	59
5.1.2 Ketiadaan Personalisasi.....	65
5.1.3 Ketiadaan Sensasionalisme .....	84
5.1.4 Ketiadaan Stereotip .....	92
5.1.5 Ketiadaan <i>Juxtaposition</i> dan <i>linkage</i> .....	96
5.1.6 Akurasi .....	100
5.2 Pembahasan.....	107
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>111</b>
6.1 Simpulan .....	112
6.2 Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>1</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penentuan Informan .....	31
Tabel 2. Berita Advertorial Radar Lampung co.id terkait Kinerja Pemerintah Provinsi .....	70
Tabel 3. Berita Advertorial Radar Lampung Surat Kabar Harian terkait Kinerja Pemerintah Provinsi .....	70
Tabel 4. Publikasi Berita Radar Lampung co.id .....	72
Tabel 5. Publikasi Berita Radar Surat Kabar Harian.....	75
Tabel 6. Publikasi Berita Radar Lampung TV .....	78
Tabel 7. Publikasi Berita Radar Riset dan Data .....	80
Tabel 8. Unit Analisis Sensasionalisme .....	88
Tabel 9. Publikasi Berita Sensasionalisme Radar Lampung.....	89

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	27
Gambar 2. Logo Radar Lampung Media Grup .....	42
Gambar 3. Logo Radar Lampung.co.id.....	43
Gambar 4. Susunan Redaksi Radar Lampung co.id.....	46
Gambar 5. Logo Radar Lampung TV .....	48
Gambar 6. Sruktur Organisasi Radar Lampung TV.....	49
Gambar 7. Rubrikasi Opini pada laman Radarlampung.co.id Sumber: Radar Lampung co.id.....	61
Gambar 8. Berita koran Radar Cetak berjudul “Gubernur: Keracunan MBG Muncul Setelah SOP Melemah.” Sumber: Radar Lampung Surat Kabar Harian .....	62
Gambar 9. Rubrikasi Advertorial Koran Radar Lampung Sumber: Radar Lampung Surat Kabar Harian.....	68
Gambar 10. Rubrikasi Advertorial Radar Lampung co.id Sumber: Radar Lampung co.id.....	69
Gambar 11. Hasil Survei Kepuasan 100 Hari Kinerja Gubernur Lampung 2025104	
Gambar 12. Persentase Berita Informatif dan Kritis Radar Lampung .....	108

## DAFTAR SINGKATAN

ABDM	: Anda Bertanya Dokter Menjawab
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRD	: <i>Disway Research Development</i>
GM	: <i>General Manager</i>
JPNN	: Jawa Pos News Network
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KNKG	: Komite Nasional Kebijakan Governance
Kw	: Kilowat
LPPD	: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
RLMG	: Radar Lampung Media Grup
R&D	: <i>Research &amp; Development</i>
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKH	: Surat Kabar Harian
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPPG	: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
TV	: Televisi
UHF	: <i>Ultra High Frequency</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam sistem pemerintahan demokratis, setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling mengimbangi, sehingga diperlukan mekanisme kontrol dari luar struktur pemerintahan. Dalam konteks ini, pers berperan sebagai pengawas publik (*watchdog*) yang memiliki kebebasan untuk memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah apabila dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat (Efendi dkk., 2023).

Fungsi dan peran pers sebagai pengawas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menempatkan media massa sebagai pilar keempat (*the fourth estate*) dalam sistem demokrasi. Melalui peran tersebut, media berfungsi memastikan jalannya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta terbuka terhadap evaluasi publik. Selain itu, media massa juga berperan dalam membentuk opini publik sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap lembaga negara (Cangara, 2016). Dengan kedudukan strategis tersebut, media massa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaannya menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan rakyat (Mailin et al., 2022).

Pelaksanaan fungsi pengawasan media dalam mengawasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan melalui kegiatan investigasi, penyampaian kritik, serta publikasi hasil pemantauan kepada masyarakat. Fungsi ini menegaskan

peran media sebagai pilar keempat tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif atau mampu mengubah perilaku pemerintah melalui tekanan moral dan opini publik yang terbangun dari pemberitaan yang kredibel. Peran strategis inilah yang menjadi dasar penting dalam memahami mengapa media memiliki fungsi pengawasan yang tak kalah signifikan dibandingkan lembaga formal negara. Mekanisme kontrol yang dilakukan media menjadi dorongan bagi aparat pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan publik (Christianto, 2023).

Meskipun media memiliki potensi besar dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi yang relevan, dalam penelitian Muklis dkk. (2024) menjelaskan bahwa efektivitas media massa dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memengaruhi kebijakan publik sering kali terkendala oleh intervensi kepentingan politik dan ekonomi. Berbagai faktor seperti bias informasi, orientasi komersial, dan penyebaran berita palsu (*hoaks*) turut menurunkan kredibilitas dan mengganggu independensi redaksional media di mata publik. Situasi ini menyebabkan masyarakat semakin sulit membedakan antara berita faktual dan opini yang dipengaruhi kepentingan tertentu. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media menurun karena media dianggap tidak lagi sepenuhnya independen dan kredibel dalam menjalankan perannya sebagai pengawas publik (Muklis, 2024).

Laporan *Digital News Report 2025* dari *Reuters Institute* juga turut mendukung hal tersebut, dengan mencatat penurunan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap berita, dari 39 persen pada 2021 menjadi 36 persen pada 2025 (Rachma, 2025). Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi media untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui praktik jurnalistik yang profesional, transparan, dan berbasis data. Menurunnya kepercayaan publik menuntut media memperkuat kualitas pemberitaan yang akurat, edukatif, serta relevan, agar mampu menjadi mitra masyarakat dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan demokratis (Azkia dkk., 2023).

Sehingga di era digital dengan arus informasi yang cepat, media massa sebagai pilar keempat demokrasi, dituntut untuk menjaga integritas dan kepercayaannya di mata publik dalam menjalankan peran dan fungsinya. Fungsi pengawasan tidak akan berjalan efektif apabila media tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme dan etika jurnalistik. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah diatur Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman moral dan profesional bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Prinsip ini menegaskan bahwa independensi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap media dalam menjalankan fungsinya. Tanpa independensi, media mudah terjebak dalam kepentingan politik maupun ekonomi yang dapat mengaburkan objektivitas serta mengurangi kualitas informasi yang disajikan (Maflucha, 2024).

Media yang independen dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, menjadi landasan penting untuk mengontrol dan memastikan terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah, akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan keuangan, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan memperbaiki kebijakan serta pelayanan publik berdasarkan evaluasi masyarakat (Putra dkk., 2025).

Akuntabilitas pemerintah tercermin dari integritas penyelenggara pemerintahan, namun lemahnya integritas ini masih menjadi persoalan di Provinsi Lampung. Pada catatan Direktori Putusan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mahkamah Agung RI yang dirangkum pada Maret 2025, sepanjang tahun 2020–2024 Provinsi Lampung mencatat 151 perkara korupsi dengan total kerugian negara Rp207,59 miliar, sehingga menempati urutan ke-10

provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Evaluasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Lampung menunjukkan lemahnya pengendalian korupsi karena belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) pencegahan dan deteksi, sistem pelaporan tidak efektif, terbatasnya kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Dari total kasus, 69 terjadi di desa dengan kerugian Rp28,2 miliar akibat dominasi kepala desa dan lemahnya pengawasan, sementara di BUMD kerugian mencapai Rp5,19 miliar karena ketiadaan pengawasan, rendahnya kualitas SDM, serta kurangnya komitmen pimpinan menjaga integritas (Gsnlampungid, 2025).

Kondisi tersebut menegaskan perlunya penguatan akuntabilitas kinerja melalui sinergi antara lembaga pengawas formal di Lampung dan aktor non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan media massa. Kolaborasi ini diharapkan mampu membangun sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat mekanisme *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Lampung. Dalam konteks ini, media lokal Lampung memiliki peran strategis untuk mendorong keterbukaan informasi, mengawasi kebijakan publik, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah provinsi.

Salah satu media lokal Lampung yang aktif menjalankan fungsi pengawasan adalah Radar Lampung Media Grup (RLMG), yang terdiri atas beberapa divisi media yaitu Radar Lampung Cetak, Radar Lampung TV, Radar Lampung co.id, serta Radar Lampung Riset dan Data. Media ini berupaya mengimplementasikan peran kontrol sosialnya melalui pemberitaan aktif mengenai kegiatan pemerintahan daerah, penyelenggaraan siaran diskusi bersama pemangku kebijakan, penyajian reportase yang berupaya menghadirkan informasi secara komprehensif bagi masyarakat, serta pelaksanaan survei opini publik, salah satunya survei mengenai kinerja pemerintah provinsi. Langkah ini bertujuan memperkuat fungsi media sebagai fasilitator evaluasi publik berbasis data, sehingga proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah dapat lebih objektif dan terukur (Arief, 2025).

Berangkat dari pentingnya independensi media dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan, hal ini menjadi landasan krusial bagi tercapainya akuntabilitas yang efektif dalam kinerja pemerintah provinsi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah independensi fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Radar Lampung Media Grup sebagai faktor kunci dalam mengontrol dan menentukan efektivitas pengawasan terhadap pemerintah provinsi Lampung. Independensi media di sini tidak hanya mencakup kebebasan editorial dan objektivitas pemberitaan, tetapi juga kemampuan Radar Lampung untuk tetap profesional menghadapi tekanan politik, kepentingan ekonomi, dan dinamika hubungan dengan pemerintah provinsi. Tanpa independensi yang kuat, media berisiko kehilangan kredibilitas, sehingga perannya sebagai kontrol sosial (*watchdog*) terhadap akuntabilitas pemerintah tidak berjalan optimal dan kurang dipercaya publik. Hal ini mendorong kebutuhan untuk menilai sejauh mana Radar Lampung menjalankan fungsi pengawasan secara independen dalam konteks kinerja pemerintahan provinsi Lampung.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga telah memberikan gambaran mengenai pentingnya independensi media massa dalam menjalankan fungsi pengawasan serta perannya terhadap kinerja pemerintahan, meskipun masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda.

- A. Penelitian yang berjudul “*Peran Strategis Media Massa dalam Mengungkap Kasus Pungli: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pendidikan Antikorupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan*” oleh Kurniati, dkk. (2025) mengkaji peran media massa dalam mengungkap praktik pungutan liar serta kontribusinya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, dengan memanfaatkan data sekunder seperti jurnal, artikel, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa memiliki peran signifikan dalam mengungkap kasus pungli, meningkatkan kesadaran publik, serta memberikan tekanan moral kepada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap praktik korupsi.

Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi empiris terhadap Radar Lampung Media Grup sebagai media lokal, sehingga lebih menekankan pada bagaimana fungsi pengawasan tersebut dijalankan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan konsep independensi media menurut Denis McQuail untuk menganalisis sejauh mana media mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif tanpa intervensi kepentingan tertentu.

- B. Penelitian berjudul “*Peran Media Massa dalam Kebijakan Publik*” oleh Muklis dkk. (2024) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis konten berita, serta didukung teori agenda-setting dan framing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa berperan dalam membentuk opini publik, memengaruhi kebijakan, serta menjalankan fungsi pengawasan, meskipun kerap menghadapi tekanan politik dan kepentingan ekonomi yang memengaruhi objektivitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan media sebagai pengawas (watchdog) dan pembentuk opini publik. Perbedaannya, penelitian Muklis dkk. berfokus pada pengaruh media terhadap kebijakan publik secara umum, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada independensi media lokal (Radar Lampung) dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dari segi teori, penelitian Muklis dkk. menggunakan teori *agenda-setting* dan *framing* untuk melihat pembentukan isu dan persepsi publik, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori independensi media menurut Denis McQuail untuk menilai objektivitas media dalam menjalankan fungsi pengawasan tanpa intervensi. Teori ini penting karena efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membentuk opini, tetapi juga oleh kebebasan media dari tekanan politik dan kepentingan ekonomi.
- C. Penelitian berjudul “*Peran Media dan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik terhadap Praktik Korupsi di Indonesia*” oleh Raifangangga, dkk. (2025) menunjukkan bahwa media

memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas pemerintah melalui penyampaian informasi yang transparan serta memberikan tekanan kepada lembaga terkait untuk meningkatkan kinerja. Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan media sebagai sarana pengawasan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun, penelitian Raifangangga dkk. tidak hanya menyoroti peran media, tetapi juga menekankan partisipasi publik sebagai faktor penting dalam proses pengawasan. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada independensi media dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya pada Radar Lampung Media Grup. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa aspek independensi media belum dikaji secara mendalam, padahal independensi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas fungsi pengawasan. Tanpa independensi, peran media dalam mendorong akuntabilitas cenderung tidak optimal dan kurang mampu memberikan tekanan yang kuat terhadap pemerintah, sehingga hal ini menjadi alasan penting untuk diteliti lebih lanjut.

- D. Penelitian berjudul “*Analisis Reportase Media Massa di Era Digital: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya pada Pandangan Khalayak*” oleh Azkia dan Imansari (2023) menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi media menjadi tantangan dalam reportase, meski demikian, kemajuan akses internet, pemanfaatan media sosial, serta inovasi dalam penyajian konten yang lebih menarik membuka peluang baru bagi media. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan pentingnya independensi media dalam menghasilkan informasi yang objektif. Perbedaannya, penelitian Azkia dan Imansari lebih menekankan pada tantangan dan peluang media di era digital, termasuk pengaruh media sosial, perubahan pola konsumsi informasi, serta pemanfaatan platform digital dalam membangun interaksi dan kepercayaan publik. Sementara itu, penelitian ini tidak berfokus pada aspek perkembangan teknologi tersebut, melainkan

analisis pada independensi media dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, khususnya pada Radar Lampung. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kajian mengenai independensi media dalam konteks fungsi pengawasan di tingkat lokal masih perlu diteliti lebih lanjut karena pemanfaatan peluang reportase di era perkembangan media sosial juga tidak akan berjalan optimal tanpa adanya independensi oleh media.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa berbagai kajian telah menekankan peran media massa dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik, baik dalam konteks pengawasan, pembentukan opini, maupun pengaruh terhadap kebijakan. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada peran media secara umum, baik melalui pendekatan konseptual maupun studi literatur, serta belum secara mendalam mengkaji praktik independensi media, khususnya pada level media lokal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Padahal, independensi media merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas fungsi pengawasan, karena tanpa kebebasan dari intervensi politik dan kepentingan ekonomi, media cenderung tidak mampu menjalankan kontrol sosial secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih spesifik dan empiris dengan menggunakan teori independensi media Denis McQuail, yang tidak hanya melihat peran media secara normatif, tetapi juga mengukur bagaimana independensi tersebut dijalankan melalui indikator-indikator yang jelas.

Sehingga penelitian ini akan berfokus pada Radar Lampung Media Grup (RLMG) karena berperan sebagai salah satu media lokal yang aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah provinsi. Dengan analisis mendalam terhadap kegiatan jurnalistik yang dilaksanakan, penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana Radar Lampung mampu mempertahankan independensi redaksional dalam menghadapi tekanan eksternal maupun internal. Dengan menelaah Radar Lampung, penelitian ini diharapkan menggambarkan peran strategis dan independensi media lokal sebagai pilar

keempat demokrasi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pemerintahan Provinsi Lampung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana independensi fungsi pengawasan Radar Lampung Media Grup terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dengan memperhatikan aspek independensi dalam praktik medianya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi fungsi pengawasan yang dijalankan Radar Lampung Media Grup terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya terkait komunikasi politik dan media massa dalam melihat independensi media dalam pengawasan akuntabilitas pemerintah provinsi. Temuan penelitian ini juga diharapkan menambah literatur mengenai hubungan media, kekuasaan, dan mekanisme kontrol sosial, serta memberikan gambaran konseptual mengenai bagaimana independensi media memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian menjadi bahan evaluasi Radar Lampung Media Grup dalam memahami tantangan dan strategi untuk menjaga independensinya. Selain itu, dapat dijadikan referensi bagi media lokal lain

dalam mengoptimalkan peran pengawasan yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga fungsi kontrol sosial media dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Media Sebagai Pilar Keempat Demokrasi

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang tersusun dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, serta *kratos* atau *cratein* yang bermakna kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kendali utama. Dalam arti harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat (Lutpiani, 2021).

Demokrasi sering dipandang sebagai sistem yang ideal karena menjadi pijakan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui demokrasi, hak asasi manusia mendapat jaminan secara utuh, seluruh warga negara diperlakukan setara di depan hukum, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sistem ini menjamin kebebasan berpolitik, berserikat, menyampaikan pendapat, mendirikan atau bergabung dengan partai politik, serta kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Bagi negara yang memilih sistem demokrasi, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dijalankan secara konsisten agar tercapai demokrasi yang ideal. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penerapannya di lapangan. Menurut Melvin I. Urofsky, profesor dari Virginia Commonwealth University, terdapat sebelas prinsip pokok dalam sistem pemerintahan demokratis dan salah satu prinsipnya adalah kebebasan media massa. Menurut Dahlan (1999), tingkat demokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh struktur dan karakter sistem komunikasinya; semakin bebas komunikasi publik, semakin kuat pula demokrasinya. Oleh sebab itu, pers berperan penting dan harus terbebas dari intervensi pemerintah dan menjamin hak setiap warga

untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas (*freedom of speech* dan *freedom of the press*) (Cangara, 2016).

Sebagaimana disampaikan Alkostar dalam Luwarso (2002), kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi. Media massa harus menjadi ruang publik (*public sphere*) yang memberi kesempatan setara bagi semua warga untuk mengekspresikan pandangan dan gagasannya secara terbuka. (Cangara, 2016). Sehingga pentingnya kebebasan media dalam melaksanakan perannya ditegaskan oleh ungkapan pada sebuah edisi *Public Opinion Quarterly* yang menyatakan “Bila ingin mendengarkan suara rakyat, jangan pernah membatasi kebebasan pers.” Hal yang sama diungkapkan oleh Mark Twain, bahwa dunia diterangi oleh dua hal, yaitu matahari di langit dan surat kabar di bumi, yang menggambarkan besarnya fungsi pers dalam memberikan pencerahan bagi publik (Cangara, 2016).

Gagasan yang menempatkan media sebagai pilar keempat demokrasi berawal dari pemikiran John Locke, yang berpendapat bahwa selain tiga cabang kekuasaan menurut Montesquieu, pemerintahan juga perlu membuka ruang bagi aspirasi rakyat melalui media. Pers memiliki fungsi untuk membentuk opini publik sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap lembaga negara. Namun, di samping menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, media juga harus mampu menilai dan mengoreksi dirinya sendiri agar tetap profesional, independen, dan beretika (Cangara, 2016).

Dengan demikian, kebebasan pers instrumen penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tegaknya kedaulatan rakyat (Nasution & Dianto, 2023). Karena melalui pers, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam kerangka ini, kebebasan pers dapat dipahami melalui dua aspek (Nasution & Dianto, 2023):

## 1. Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Pers berfungsi sebagai sarana warga negara dalam menyampaikan pikiran dan pendapat serta menjadi instrumen pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang mencakup kebebasan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa intervensi pihak lain. Agar perannya tetap konstruktif, pers dituntut profesional dengan berpegang pada kode etik jurnalistik serta menghadirkan pemberitaan berimbang. Pada hakikatnya, kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak hukum yang memungkinkan setiap individu berbagi gagasan dan informasi secara terbuka.

## 2. Kebebasan Pers dan Pers Bebas

Kebebasan pers berarti media massa bekerja tanpa intervensi pihak tertentu, sementara pers bebas merujuk pada hak meliput dan menyebarkan informasi secara sah dengan tetap tunduk pada kode etik dan ketentuan hukum, termasuk UU No. 40 Tahun 1999. Pasca reformasi, kebebasan pers menjadi salah satu pilar demokrasi yang menjamin akses publik terhadap informasi beragam dan akurat. Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh aturan etika dan hukum, seperti UU ITE untuk media digital, guna mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, kebebasan pers tidak hanya mendukung partisipasi publik dalam politik, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.

## 2.2 Independensi Fungsi Media Massa

Secara etimologis, istilah media massa berasal dari dua kata, yaitu *media* dan *massa*. Kata *media* berasal dari bahasa Latin *medium*, yang berarti perantara atau alat untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima, sering juga disebut saluran atau *channel* dalam komunikasi. Sementara itu, *massa* berasal dari bahasa Inggris *mass*, yang berarti kelompok orang atau khalayak luas. Dengan demikian, media massa dapat dipahami sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas dan serentak. Dalam

praktik modern, media massa mencakup teknologi seperti surat kabar, radio, televisi, dan media daring, berbeda dengan media tradisional seperti kentongan atau beduk. (Yuningsih dkk., 2023).

Menurut Wilbur Schramm, media massa berperan sebagai pengelola arus informasi dalam masyarakat dan menekankan pentingnya umpan balik (*feedback*) dalam komunikasi dua arah. Dalam media modern, audiens tak lagi pasif, melainkan turut berkontribusi sebagai produsen konten yang membentuk arus informasi dan wacana publik (Fauziatun & Agustini, 2025). Sementara itu, Cangara menjelaskan bahwa media massa adalah perantara komunikasi yang menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak luas secara serentak, melalui saluran seperti surat kabar, radio, televisi, dan film. Adapun Severin dan Tankard membagi media massa menjadi tiga jenis utama: cetak, elektronik, dan daring, yang berkembang sesuai teknologi dan kebutuhan audiens (Agustin, 2025).

Adapun karakteristik media massa menurut Cangara mencakup beberapa aspek penting (Yuningsih dkk., 2023).

1. Media massa dikelola secara institusional, yang berarti operasionalnya melibatkan banyak pihak mulai dari proses pengumpulan hingga penyajian informasi.
2. Komunikasi yang dilakukan bersifat satu arah, sehingga kurang memungkinkan terjadinya dialog langsung antara komunikator dan khalayak; jika pun ada respons, biasanya tertunda.
3. Media memiliki jangkauan yang luas dan mampu menyampaikan informasi secara serentak, melintasi batas waktu dan ruang.
4. Penyebaran pesan dilakukan melalui perangkat teknologi seperti surat kabar, radio, dan televisi.
5. Media bersifat terbuka, di mana isi pesan dapat diakses oleh siapa pun tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang etnis.

Media massa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial terhadap kepentingan publik. Makna sederhananya menunjukkan bahwa media membawa sejumlah tugas penting dan pokok dalam masyarakat kontemporer dan menjadi kepentingan umum agar tugas-tugas tersebut dijalankan dengan baik. Namun, gagasan tersebut tidak mudah diterapkan dalam praktik karena kontrol publik terhadap media sering kali bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dalam sistem demokratis. Selain itu, media tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik, melainkan juga mengejar tujuan internal, di mana kepentingan bisnis kerap menjadi faktor dominan yang memengaruhi arah dan kebijakan media. Akibatnya, saat media beroperasi secara komersial, kepentingan publik sering disamakan dengan selera masyarakat, sehingga tanggung jawab atas norma, etika, dan nilai sosial berpindah dari media kepada publik (McQuail, 2011).

Sebagai pelaksana fungsi pengawasan media massa, pers harus menjalankan tugas dan perannya berdasarkan (Cangara, 2016):

1. Kejujuran.
2. Mengutamakan kepentingan publik.
3. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
4. Menjaga kepercayaan publik.
5. Sensitif terhadap sumber dan objek berita.
6. Tidak menimbulkan kekacauan.
7. Menjalankan fungsi pengawasan (*watchdog*).
8. Menjaga hak untuk memberitakan, menolak, dan melindungi sumber informasi.

Kebebasan pers wajib dijalankan secara benar sesuai dengan kode etik dan prinsip profesionalisme dalam mengakses, mengolah, serta menyebarkan informasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab akan menghasilkan informasi yang akurat, bermutu, dan berguna bagi pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pengawasan terhadap pemerintah, kebebasan pers yang

dijalankan secara profesional memungkinkan media untuk menilai, mengkritisi, dan melaporkan kinerja pemerintah secara objektif, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar pengawasan yang memastikan pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambilnya (Cangara, 2016).

## **2.3 Akuntabilitas Pemerintahan Daerah**

### **2.3.1 Konsep Akuntabilitas dalam Pemerintahan Daerah**

Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pihak yang menerima amanah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemberi amanah. Dalam konteks *good governance*, akuntabilitas menuntut pemerintah, termasuk di tingkat daerah, untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan serta hasil kerjanya secara transparan. Prinsip ini juga mendorong terwujudnya pengawasan yang efektif melalui pembagian kewenangan di antara otoritas, manajemen, dan lembaga pengawas. (Afriza, 2021). Menurut Rosjidi, akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang dipercaya mengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan program secara fiskal, manajerial, dan teknis. Lembaga Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menekankan akuntabilitas sebagai kewajiban melaporkan dan menjelaskan kinerja kepada pihak berwenang (Afriza, 2021).

Akuntabilitas pemerintah daerah sangat penting karena pemerintah daerah memegang tanggung jawab utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dengan kewenangannya, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur serta merencanakan arah dan tujuan pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat dipertanggungjawabkan

melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang menjadi sarana pengawasan umum terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah. LPPD merupakan laporan kemajuan (progress report) yang disampaikan kepada pemerintah pusat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, sehingga setiap langkah pembangunan dapat dipantau secara transparan dan akuntabel (Arischa & Frinaldi, 2023).

Akuntabilitas menjadi fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan bersih dan berkelanjutan, bebas dari praktik KKN, serta menjunjung transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi publik. Lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, ADB, OECD, dan KNKG juga menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam kerangka *good governance* (Mauni, 2025).

Adapun Dimensi-Dimensi Akuntabilitas adalah sebagai berikut (Agustin & Dwiningwarni, 2023):

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Kepatuhan Hukum: Setiap pejabat pemerintah wajib menjalankan tugas dengan jujur dan mematuhi peraturan hukum serta norma etika publik. Dimensi ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan tindakan administrasi berada dalam koridor hukum.
2. Akuntabilitas Prosedural: Fokus pada kualitas proses pelaksanaan tugas, termasuk penerapan sistem informasi, manajemen, dan prosedur kerja yang mendukung administrasi pemerintah yang tertib, efisien, dan transparan.
3. Akuntabilitas Programatik: Menilai efektivitas program pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk efisiensi penggunaan anggaran dan pertimbangan alternatif program yang lebih optimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan: Menuntut pemerintah pusat dan daerah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat dan

legislatif, memastikan kebijakan sesuai aspirasi publik, prinsip keterwakilan, dan sistem demokrasi.

### **2.3.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik**

Prinsip akuntabilitas menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas menjadi standar profesional yang harus dijalankan aparat pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Prinsip ini berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, membantu aparatur mengenali keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas, serta menuntut agar seluruh kegiatan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara adil kepada pihak yang berhak (Kushartiningsih & Riharjo, 2021).

Akuntabilitas menuntut adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, kejelasan pelaporan, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar setiap program pelayanan benar-benar berjalan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang transparan dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan publik akan mampu mengelola sumber daya secara efisien, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan. Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan menurunkan mutu layanan yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas kinerja dalam pelayanan publik tidak hanya menjadi kewajiban administratif. Dengan layanan publik yang semakin berkualitas, pemerintah tidak hanya menunjukkan kinerjanya secara transparan, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerjanya. (Lathifah dkk., 2024).

Adapun faktor yang memengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan daerah yang meliputi berbagai lembaga yang saling berkaitan yaitu (Agustin & Dwiningwarni, 2023):

1. Pengawasan Legislatif: Lembaga legislatif memiliki peran penting dalam memastikan setiap keputusan pemerintah selaras dengan tujuan yang ingin dicapai serta meningkatkan kinerja pejabat publik.
2. Akuntabilitas Hukum: Pemerintah dan pejabat negara wajib mematuhi peraturan perundang-undangan; pelanggaran hukum harus ditindak dan pertanggungjawabannya dapat diproses secara hukum.
3. Peran Ombudsman: Lembaga Ombudsman melindungi hak masyarakat, terutama ketika pelayanan publik tidak sesuai atau merugikan masyarakat.
4. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat: Pemerintahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menuntut pejabat daerah memberikan pelayanan adil, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat secara langsung.
5. Pengawasan Administratif Internal: Pimpinan unit kerja harus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan pegawai bekerja sesuai aturan dan etika.
6. Peran Media Massa dan Opini Publik: Media dan opini publik berfungsi sebagai kontrol eksternal yang efektif, mencegah atau menekan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintah.

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah dapat tercapai dengan kerjasama dan interaksi antara pengawasan internal dan eksternal yang saling mendukung. Lembaga legislatif, Ombudsman, serta mekanisme administratif internal bekerja sama dengan media massa untuk membangun sistem pengawasan yang menyeluruh. Dalam konteks ini, media massa berperan sebagai pengawas independen yang menyampaikan informasi akurat kepada

publik, menyoroti kebijakan pemerintah, dan mendorong pejabat publik bertindak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

## 2.4 Pengawasan Media Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berangkat dari sistem demokrasi, partisipasi warga negara dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah tidak hanya mencerminkan kebebasan politik, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan daerah (Supriyanto dkk., 2024). Dalam demokrasi, media massa memegang peran sentral sebagai penghubung antara pemerintah, aktor politik, dan masyarakat, yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Adapun perannya adalah sebagai sarana penyampaian informasi, memfasilitasi dialog politik, membentuk opini publik, mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi. Perannya sangat strategis dalam menciptakan ruang diskusi (demokrasi) yang terbuka, seimbang, dan informatif, yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pengambil kebijakan dan masyarakat luas (Kirana dkk., 2024).

Fungsi pengawasan media massa atau surveillance disampaikan oleh Dominick dalam bukunya yang berjudul *“The Dynamics of Mass Communications: Media in the Digital Age”* tahun 2016 adalah salah satu fungsi utama media massa dalam komunikasi massa. Fungsi ini menunjukkan bagaimana media bertindak sebagai pengawas atau kontrol sosial yang memantau dan melaporkan kejadian penting, peristiwa atau ancaman yang perlu diketahui oleh publik maupun pihak terkait.

Pengawasan media massa terbagi menjadi dua bentuk utama (Dominick, 2006):

1. Pengawasan Peringatan (*Warning Surveillance*): Media memberikan peringatan kepada masyarakat tentang potensi ancaman atau bahaya, seperti

bencana alam, inflasi, krisis sosial, atau ancaman militer. Media berperan memberi informasi yang dapat mengantisipasi bahaya tersebut agar masyarakat dapat waspada.

2. Pengawasan Instrumental (*Instrumental Surveillance*): Media menyampaikan informasi yang berguna dan memiliki kegunaan praktis bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya informasi tentang kebijakan pemerintah, program sosial, peluang kerja, kesehatan, dan lain sebagainya. Informasi ini membantu masyarakat membuat keputusan dan bertindak dengan lebih baik.

Melalui pemberitaan yang berimbang, analisis yang mendalam, dan penyajian berbagai perspektif, media membantu menciptakan pemahaman bersama dan meningkatkan kualitas interaksi politik. Peran ini turut memperkecil kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dialog tidak hanya bersifat satu arah (Kirana dkk., 2024).

Lebih jauh, media juga berperan dalam membentuk sikap dan pandangan politik masyarakat. Informasi yang disampaikan media dapat memengaruhi kesadaran politik sehingga mendorong keterlibatan aktif publik dalam isu-isu pemerintahan (Ahmad Salman Farid, 2023). Sehingga media perlu bebas untuk memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang beragam dan akurat, sehingga mereka mampu mengambil keputusan politik secara rasional. Kolaborasi antara media, aktor politik, dan organisasi sipil juga dapat memperkuat peran media dalam menciptakan ekosistem dialog politik yang inklusif dan informatif (Farid, 2023).

Merujuk pada fungsi pengawasan, dalam gagasan Edmund Burke pada akhir abad ke-18, melihat media memiliki pengaruh politik yang sejajar dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Dalam konteks negara demokrasi, sistem *trias politica* memang mendukung prinsip pembagian kekuasaan untuk mencegah dominasi elit politik. Namun dalam praktiknya, ketiga pilar tersebut sering kali tidak sepenuhnya mampu mewakili aspirasi publik secara langsung.

Di sinilah media massa berperan sebagai aktor independen yang bertindak sebagai watchdog, mengawasi jalannya pemerintahan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat dan objektif, media menyoroti kinerja pemerintah daerah, mendorong pejabat publik bertanggung jawab, serta memperkuat akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah (Wasistha, 2025).

Adapun alasan Perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemerintahan yaitu (Wasistha, 2025):

1. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Pengawasan membantu mencegah atau mengungkap penyimpangan, kesalahan prosedural, dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran sehingga kredibilitas pemerintah meningkat di mata publik.
2. Mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Pengawasan berfungsi sebagai evaluasi kinerja pemerintah dalam menyusun dan menjalankan kebijakan publik. Masyarakat dan lembaga pengawas dapat memberikan masukan atau koreksi terhadap kebijakan yang dinilai kurang efektif atau tidak berpihak pada rakyat.
3. Mendorong partisipasi dan kontrol sosial dari rakyat. Pengawasan memberikan informasi relevan dan edukatif tentang urusan pemerintahan, sehingga mendorong keterlibatan publik melalui pemilu, dialog kebijakan, petisi, atau mekanisme pelaporan lainnya. Partisipasi ini memperkuat demokrasi dan pengawasan warga terhadap pemerintah.

Pengawasan tersebut dilakukan bukan hanya sebagai koreksi atas kesalahan, tetapi juga sebagai alat pencegahan yang menjaga proses administrasi publik tetap berada dalam jalur yang benar.

Pengawasan pelayanan publik oleh pemerintah di Indonesia, diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, menekankan pentingnya pengawasan kinerja penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, bersih, dan responsif. Pengawasan eksternal mencegah

penyalahgunaan kekuasaan sekaligus membentuk aparatur profesional, bebas KKN, dan bertugas secara terbuka. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada pengawasan menyeluruh, baik internal maupun partisipasi masyarakat (Setiawan, 2024).

## 2.5 Teori Independensi Media

Denis McQuail, dalam bukunya yang berjudul “*Media Performance: Mass Communication and the Public Interest* (1992)”, memandang independensi media sebagai prinsip normatif tentang ketidakberpihakan (*impartiality*) yang mendasar dalam kinerja media massa terhadap kepentingan publik. Independensi dimaknai sebagai kemampuan media untuk mempertahankan otonomi editorial dan profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya, sehingga proses produksi berita tidak diarahkan atau dikendalikan oleh kepentingan politik, ekonomi, maupun institusional tertentu. Dalam konteks ini, independensi memungkinkan media mengambil keputusan pemberitaan berdasarkan pertimbangan jurnalistik dan kepentingan publik, bukan tekanan atau kepentingan pihak luar. McQuail menegaskan bahwa independensi bukan berarti media sepenuhnya bebas nilai atau interpretasi, melainkan bebas dari intervensi eksternal yang berpotensi mengganggu integritas pemberitaan. Dengan independensi tersebut, media memiliki ruang untuk menjalankan fungsi informatif dan pengawasan secara lebih objektif dan bertanggung jawab (Mcquail, 1992).

Teori independensi media Denis McQuail dipilih dalam penelitian ini karena memberikan kerangka yang komprehensif sekaligus operasional dalam mengkaji independensi media. McQuail tidak hanya menjelaskan peran ideal media, tetapi juga menyediakan indikator yang jelas dan terukur, terutama melalui objektivitas dan netralitas pemberitaan. Media yang independen akan menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak bias, sedangkan intervensi politik atau ekonomi berpotensi menurunkan kualitas tersebut. Hal ini relevan dengan fokus penelitian yang tidak hanya melihat peran media

sebagai pengawas, tetapi juga menilai apakah fungsi tersebut dijalankan secara bebas dari intervensi. Dengan demikian, teori McQuail menjadi tepat digunakan karena mampu menghubungkan konsep dengan praktik serta memberikan alat analisis yang sistematis untuk menilai independensi Radar Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Hingga saat ini, pemikiran McQuail mengenai independensi dalam pemberitaan, terus diadopsi dan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dalam berbagai konteks penelitian empiris. Hal ini terlihat, antara lain, dalam penelitian mengenai independensi Beritajatim.com Octavia dkk (2022) serta pengkajian independensi media daring Kabarsinjai.com Iskandar & Yusuf (2024). Sejalan dengan penjelasan McQuail mengenai independensi media, dalam *Jurnal Dewan Pers* Edisi No. 09 Juli 2014 merujuk langsung pada McQuail (1992), menguraikan beberapa indikator penting dalam melihat persoalan independensi (objektivitas) dan netralitas media dalam pemberitaan (Pers, 2014).

## **Indikator-Indikator Independensi Media**

### **1. Keberadaan Opini**

Keberadaan opini dalam pemberitaan berkaitan dengan kemampuan media membedakan fakta dan pendapat. Fakta merujuk pada peristiwa yang dilaporkan, sedangkan opini merupakan penafsiran terhadap suatu isu. Pemberitaan idealnya menekankan penyajian fakta agar publik memperoleh pemahaman yang lebih utuh, mengingat berita menjadi rujukan masyarakat dalam memahami realitas sosial. Oleh karena itu, opini perlu dibatasi agar tidak mengaburkan fakta serta tetap menjaga objektivitas dan independensi media..

### **2. Ketiadaan Personalisasi**

Ketiadaan personalisasi dalam pemberitaan merujuk pada upaya media untuk tidak menonjolkan individu tertentu, seperti pemilik media atau aktor politik, secara berlebihan dalam suatu peristiwa. Personalisasi terjadi ketika peran atau citra seseorang lebih ditekankan dibandingkan substansi kejadian yang diberitakan. Penonjolan individu semacam ini dapat mengurangi keberagaman

informasi dan mengaburkan pemahaman publik terhadap peristiwa yang sebenarnya.

### **3. Ketiadaan Sensasionalisme**

Ketiadaan sensasionalisme dalam pemberitaan menunjukkan bahwa media menyajikan informasi secara terkendali dan tidak berlebihan. Sensasionalisme ditandai oleh penonjolan emosi dan dramatisasi yang melampaui aspek rasional dalam berita, seperti penggunaan ekspresi emosional atau penggambaran peristiwa secara hiperbolik. Praktik semacam ini berpotensi mengurangi objektivitas dan netralitas pemberitaan.

### **4. Ketiadaan Stereotip**

Ketiadaan Dalam pemberitaan, stereotip berkaitan dengan kecenderungan media membentuk gambaran tertentu tentang individu atau kelompok yang kemudian dianggap sebagai kebenaran umum. Ketika media menggunakan atribut atau ciri yang dilekatkan secara berulang, informasi yang disampaikan tidak lagi berdiri pada fakta peristiwa, melainkan pada persepsi yang disederhanakan. Praktik semacam ini dapat memengaruhi cara publik memandang dan menilai kelompok tertentu.

### **5. Ketiadaan *Juxtaposition* (Penyandingan) dan *linkage* (Pengaitan)**

*Juxtaposition* dan *linkage* menunjukkan bahwa media menyandingkan fakta-fakta yang sebenarnya berbeda seolah-olah saling berkaitan. *Juxtaposition* terjadi ketika dua fakta politik yang berbeda ditempatkan berdampingan sehingga tampak saling berhubungan, dengan tujuan menonjolkan kontras atau membangun citra tertentu, misalnya dengan mengaitkan kelebihan pribadi aktor politik pada isu yang tidak berkaitan langsung. Sementara itu, *linkage* merujuk pada praktik menghubungkan berbagai fakta, peristiwa, atau aktor politik yang terpisah sehingga terlihat memiliki hubungan sebab akibat.

### **6. Akurasi**

Akurasi dalam pemberitaan ditentukan oleh ketepatan media dalam memilih sumber yang relevan dengan tema berita. Misalnya, narasumber seharusnya merupakan pihak yang mengetahui, mengalami, atau memiliki keahlian terkait

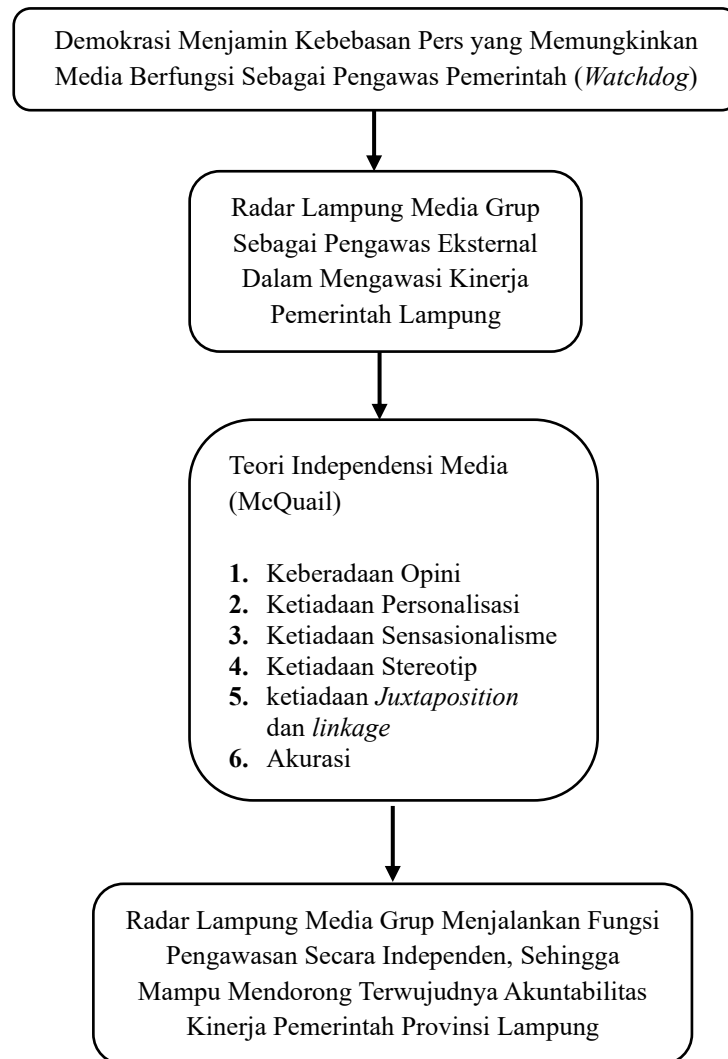
peristiwa yang diberitakan. Ketepatan ini penting karena narasumber berpengaruh langsung terhadap keandalan informasi yang diterima publik.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari prinsip dasar demokrasi yang menjamin kebebasan pers, sehingga memungkinkan media massa berfungsi sebagai pengawas (*watchdog*) terhadap kinerja pemerintah. Dalam sistem demokrasi, peran media sebagai pengontrol eksternal menjadi sangat penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Radar Lampung Media Grup sebagai media lokal di provinsi Lampung menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan peliputan, analisis, dan publikasi informasi terkait kinerja Pemerintah Provinsi Lampung.

Untuk menilai sejauh mana independensi Radar Lampung Media Grup dalam menjalankan fungsi pengawasan, penelitian ini menggunakan Teori Independensi Media dari pemikiran McQuail yang mengedepankan enam indikator: keberadaan opini, ketiadaan personalisasi, ketiadaan sensasionalisme, ketiadaan stereotip, ketiadaan *Juxtaposition* dan *linkage* dan akurasi. Dengan kerangka ini, penelitian menegaskan bahwa implementasi prinsip-prinsip independensi media akan mendorong Radar Lampung Media Grup menjalankan pengawasan secara independen serta mampu berkontribusi nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Provinsi Lampung.

Adapun diagram kerangka berpikir yang menjadi acuan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menguraikan fenomena sosial secara mendalam melalui proses pemaknaan terhadap konteks, pengalaman, dan sudut pandang individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang dikaji. Sasaran utama penelitian kualitatif adalah untuk meraih pemahaman yang holistik dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Sasaran ini mencakup pemahaman terhadap pengalaman individu, proses-proses sosial, konteks budaya, pola interaksi, pembentukan makna, serta dinamika yang berlangsung dalam fenomena tersebut (Ardiansyah dkk., 2023).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis independensi fungsi pengawasan Radar Lampung Media Group sebagai media lokal dalam mendorong akuntabilitas pemerintah Provinsi Lampung. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena dianggap relevan untuk menggambarkan fenomena secara nyata berdasarkan data lapangan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang jelas dan kontekstual mengenai independens praktik fungsi kontrol sosial media lokal terhadap pemerintah provinsi.

Sesuai dengan karakteristik penelitian deskriptif, studi ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau membuat prediksi, melainkan memaparkan secara rinci situasi dan konteks berdasarkan data empiris. Tujuannya adalah menjelaskan secara holistik independensi fungsi pengawasan Radar Lampung Media Group terhadap akuntabilitas pemerintahan. Peneliti berperan sebagai pengamat aktif

yang menggali makna dan proses dalam konteks alami, sehingga diperoleh pemahaman yang valid dan mendalam mengenai kontribusi media lokal dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam pendekatan kualitatif, objek penelitian merujuk pada elemen utama yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan dalam suatu studi. Objek ini biasanya dianggap sebagai komponen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jalannya penelitian, serta menjadi inti dari fenomena yang hendak dianalisis secara mendalam (Safrudin dkk., 2023). Penelitian ini dilaksanakan di Gedung Graha Pena, yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.18, Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35128. Gedung ini merupakan pusat operasional dari Radar Lampung Grup, salah satu perusahaan media lokal terbesar dan paling berpengaruh di Provinsi Lampung. Radar Lampung Grup menaungi berbagai platform media seperti Radar Lampung Cetak, Radar Lampung TV, Radar Lampung co.id, serta unit khusus riset bernama Radar Lampung Riset dan Data.

Pemilihan Gedung Graha Pena sebagai lokasi penelitian didasari oleh perannya sebagai pusat kegiatan jurnalistik dan riset Radar Lampung Media Grup yang berpengaruh besar dalam mengumpulkan hingga membentuk opini publik dan mengawasi kinerja Pemerintah Provinsi Lampung. Di tengah persoalan transparansi dan akuntabilitas daerah, lokasi ini menjadi tempat paling relevan untuk menelusuri bagaimana independensi strategi pengawasan media dijaga dalam proses kegiatan jurnalistiknya yang menjadi instrumen kontrol sosial terhadap pemerintah provinsi.

### 3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian adalah uraian mengenai dimensi yang menjadi pusat perhatian, yang akan dianalisis secara mendalam hingga tuntas dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2013). Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara kontekstual serta menelaah tindakan sosial tidak hanya dari yang tampak, tetapi juga dari makna yang mendasarinya.

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada independensi fungsi pengawasan Radar Lampung Media Grup yang mencakup Radar Lampung Cetak, Radar Lampung TV, RadarLampung.co.id, serta Radar Lampung Riset dan Data dalam mendorong akuntabilitas Pemerintah Provinsi Lampung. Penelitian ini secara khusus membatasi ruang lingkup pengamatan pada periode tahun 2025, yakni masa awal kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela yang resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Dengan demikian, seluruh berita dan konten yang dianalisis berasal dari publikasi setelah tanggal pelantikan tersebut. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana Radar Lampung mempertahankan independensi fungsi pengawasannya dengan menggunakan indikator:

- a. Pembedaan jelas antara fakta, opini, dan interpretasi dalam pemberitaan dan survei.
- b. Penghindaran personalisasi yang menonjolkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- c. Pencegahan sensasionalisme yang dapat mengaburkan objektivitas dan menurunkan kredibilitas.
- d. Menolak stereotip dan narasi diskriminatif yang dapat memecah belah masyarakat.
- e. Penghindaran *juxtaposition* dan *linkage* yang menyandingkan atau mengaitkan fakta-fakta berbeda seolah-olah saling berhubungan
- f. Menjaga akurasi dan validitas informasi dengan dukungan data dan fakta terpercaya.

### 3.4 Penentuan Informan

Informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Bungin, informan merupakan individu yang memberikan umpan balik guna mengonfirmasi data yang dikumpulkan peneliti (Bungin, 2011). Dalam penelitian ini, informan diwawancarai secara mendalam untuk memperoleh data mengenai peran Radar Lampung Media Group dalam mendorong akuntabilitas pemerintah provinsi.

Penelitian ini melibatkan sejumlah key informan yang berasal dari berbagai divisi dalam Radar Lampung Media Grup:

1. Radarlampung.co.id (media daring)
2. Radar TV Lampung (media penyiaran)
3. Radar Lampung Surat Kabar Harian (media koran cetak)
4. Radar Riset dan Data (unit survei)

Berikut tabel penjelasan rinci tentang penentuan informan dalam penelitian.

Tabel 1. Penentuan Informan

No	Divisi	Nama Informan dan Jabatan	Kriteria Pemilihan
1	Radarlampung.co.id	Widi Sandika Budiman (General Manager Radarlampung co.id)	Memahami dinamika pemberitaan daring dan ruang publik digital dalam fungsi pengawasan pemerintah.
2	Radar Lampung Surat Kabar Harian	- Abdul Karim (Pemimpin Redaksi) - Yuda Pranata (Koordinator Liputan) - Agung Budiharto (Redartur Pelaksana)	Berperan langsung dalam penyusunan berita cetak mengenai pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah provinsi.
3	Radar TV Lampung	Hendarto Setiawan (Deputi GM Radar Lampung TV)	Terlibat dalam penyajian informasi audiovisual yang mendukung kontrol sosial terhadap pemerintah provinsi.
4	Radar Riset dan Data	Abdul Karim, (Direktur Radar Lampung Riset dan Data)	Berperan dalam pengumpulan dan analisis data yang memperkuat fungsi pengawasan media terhadap pemerintah provinsi.

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

### 3.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.5.1 Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung peneliti dari sumber pertama di lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari pihak internal Radar Lampung Media Group yang terlibat praktik jurnalistik dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Sumber Data Primer meliputi:

1. Pihak Internal Radar Lampung Media Group

a. Radarlampung.co.id

Mengelola pemberitaan digital terkait isu pemerintahan dan akuntabilitas publik, serta berperan dalam memperluas jangkauan pengawasan media melalui penyebaran informasi secara cepat dan interaktif kepada masyarakat.

b. Radar TV Lampung

Memproduksi siaran berita, liputan investigatif, dan program diskusi publik yang mengkritisi kebijakan pemerintah provinsi, sehingga berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

c. Radar Lampung Surat Kabar Harian

Menyusun dan mempublikasikan berita kebijakan serta kinerja pemerintah provinsi melalui media cetak, yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial

d. Radar Riset dan Data

Melakukan riset dan survei opini publik mengenai kinerja pemerintah provinsi, yang hasilnya menjadi bahan analisis dan pemberitaan media dalam mendorong pengawasan terhadap akuntabilitas pemerintahan provinsi.

### 3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber tertulis yang sudah tersedia. Data ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis dalam penelitian.

Sumber data sekunder meliputi:

1. Buku ilmiah dan jurnal akademik yang relevan dengan tema pengawasan media massa, independensi media, kode etik jurnalistik/pers serta akuntabilitas pemerintahan daerah.
2. Artikel hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan independensi fungsi pengawasan media dalam demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
3. Dokumen kelembagaan, serta arsip berita yang terkait dengan praktik dan dinamika pemberitaan Radar Lampung dan lingkup pemerintahan daerah.

## 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama yaitu:

### 3.6.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks penelitian, guna memahami perilaku, interaksi, dan situasi yang terkait dengan fenomena yang diteliti (Ardiansyah et al., 2023). Dalam penelitian ini, observasi bertujuan memahami secara nyata independensi pelaksanaan fungsi jurnalistik dan kontrol sosial yang dijalankan oleh Radar Lampung Media Group dalam mengawal akuntabilitas pemerintah Provinsi Lampung.

Observasi dilakukan dalam dua bentuk utama:

### **1. Observasi Langsung**

Dilaksanakan secara tatap muka di lingkungan kerja Radar Lampung Media Group yang berlokasi di Gedung Graha Pena, Bandar Lampung. Aktivitas yang diamati meliputi proses penentuan isu/berita, peliputan berita, koordinasi antar staf, penyusunan dan pengelolaan konten pemberitaan yang dihubungkan dengan indikator independensi media.

### **2. Observasi Tidak Langsung**

Dilakukan melalui pemantauan kanal berita online dan TV Radar Lampung melalui akun Youtube Radar TV, akun media sosial resmi, serta publikasi digital lainnya yang dikelola oleh media tersebut. Observasi tidak langsung ini dimaksudkan untuk mengkaji pola pemberitaan, pendekatan penyampaian isu pemerintahan, narasi yang dibangun dan lainnya untuk membandingkan dengan indikator independensi media.

Observasi langsung dan tidak langsung memperkuat validitas data dengan menghadirkan perspektif internal media dan interaksi dengan audiens. Data ini dianalisis untuk melihat independensi Radar Lampung menjalankan fungsi pengawasannya dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, hingga partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.

### **3.6.2 Wawancara**

Menurut Creswell (2014), wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Wawancara bertujuan menggali pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti (Ardiansyah et al., 2023). Dalam penelitian ini, wawancara bertujuan memahami bagaimana independensi Radar Lampung Media Grup menjalankan independensi fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung. Informan meliputi pihak internal Radar Lampung, Radar Lampung Cetak, Radar Lampung TV, Radar Lampung co.id, serta unit khusus riset bernama Radar Lampung Riset

dan Data. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang independensi fungsi pengawasan Radar Lampung terhadap pemerintah provinsi melalui kegiatan jurnalistik tiap divisinya.

### **3.6.3 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen, arsip, atau bahan tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber dapat berupa laporan, catatan, surat, buku, maupun dokumen resmi yang memberi gambaran historis, kebijakan, peristiwa, serta perkembangan yang relevan (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi melengkapi dan memperkuat hasil wawancara serta observasi, sekaligus memberikan bukti empiris dan konteks historis mengenai independensi pengawasan Radar Lampung terhadap akuntabilitas pemerintah Provinsi Lampung.

#### **Jenis Data Dokumentasi yang Dikumpulkan**

##### **1. Arsip Berita**

- a. Mengumpulkan artikel, liputan, dan pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh Radar Lampung dalam berbagai platform (cetak, daring, survei dan siaran televisi) terkait isu pemerintahan daerah Lampung.
- b. Arsip ini membantu menganalisis pola pemberitaan, isi berita, dan bagaimana media menjalankan independensi fungsi pengawasan media.

##### **2. Dokumen Konseptual dan Kebijakan Media**

- a. Mengumpulkan dokumen internal Radar Lampung, termasuk pedoman editorial, kebijakan jurnalistik, SOP redaksi, serta strategi kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan independensi media.
- b. Dokumen ini juga mencakup referensi konseptual dari literatur maupun regulasi tentang independensi media dan mekanisme pengawasan yang menjadi standar ideal dalam praktik jurnalistik.

### **3. Rilis dan Publikasi Media Terkait Kinerja Pemerintah**

- a. Mengumpulkan materi publikasi resmi Radar Lampung yang menyoroti kinerja dan kebijakan pemerintah provinsi, baik berupa berita investigatif, laporan khusus, maupun analisis data terkait isu pemerintahan.
- b. Data ini membantu menilai apakah media mampu menyajikan informasi yang obyektif, kritis, dan bebas dari pengaruh politik atau kepentingan eksternal dalam menjalankan fungsi pengawasan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses sistematis menafsirkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengelompokkannya ke dalam kategori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif, analisis bertujuan menemukan makna mendalam dari data sehingga mampu menggambarkan realitas sosial secara kontekstual. Proses ini meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan teori. Analisis data merupakan proses mengolah informasi yang diperoleh selama penelitian hingga menghasilkan temuan yang kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah:

#### **1. Pengumpulan Data**

Tahap awal dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan Radar Lampung Media Group, Deputy General Manager, wartawan, dan editor berita. Selain itu, observasi tidak langsung dilakukan terhadap aktivitas publikasi berita dan survei melalui kanal media daring dan media sosial. Data pendukung berupa arsip berita, laporan, dan publikasi digital juga dikumpulkan untuk melengkapi informasi lapangan.

## **2. Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengorganisasi, dan memfokuskan informasi yang relevan dengan independensi fungsi pengawasan Radar Lampung Media Grup terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Lampung. Data dikelompokkan berdasarkan kategori seperti: peran media dalam menjalankan fungsi pengawasan, mekanisme dan praktik menjaga independensi redaksional, strategi publikasi yang mendukung kontrol sosial, serta kontribusi media dalam mendorong akuntabilitas pemerintah provinsi. Informasi yang tidak terkait dengan fokus penelitian, misalnya kegiatan media yang bersifat hiburan atau non-pengawasan, disisihkan agar analisis lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kerangka teori independensi media.

## **3. Penyajian dan Verifikasi Data**

Setelah melalui reduksi, data disajikan dalam bentuk naratif deskriptif yang menampilkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang ditemukan di lapangan. Data yang sudah dikategorikan kemudian ditafsirkan dan dikaitkan dengan teori independensi media. Dari tahap ini ditarik kesimpulan sementara, yang kemudian diverifikasi melalui triangulasi data dan klarifikasi dengan informan untuk memastikan keabsahan temuan penelitian.

Melalui teknik analisis ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana independensi Radar Lampung Media Group menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah provinsi Lampung. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas dan mendalam mengenai pentingnya independensi fungsi pengawasan media lokal dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

### **3.8 Teknik Keabsahan Data**

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu metode untuk menguji keabsahan data melalui perbandingan dari berbagai sudut atau sumber

informasi. Menurut Kriyantono, triangulasi dapat dilakukan melalui lima aspek, yakni triangulasi sumber, waktu, teori, periset, dan metode (Kriyantono, 2006). Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sejumlah informan yang berbeda namun membahas topik yang sama.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari para pimpinan redaksi di setiap divisi Radar Lampung Media Group (Radar Lampung TV, RadarLampung.co.id, Radar Lampung Surat Kabar Harian, Radar Lampung Riset dan Data). Para informan tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan redaksional, pengelolaan pemberitaan, dan penentuan standar jurnalistik di masing-masing divisi. Pendekatan triangulasi ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan persepsi, pengalaman, dan penjelasan dari berbagai pihak sehingga dapat mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan informasi secara menyeluruh. Dengan demikian, bias subjektif yang mungkin timbul dari satu sumber dapat diminimalisir. Hasil triangulasi sumber ini akan menjadi landasan kuat dalam menyimpulkan independensi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Radar Lampung Media Grup sebagai aktor mendorong akuntabilitas pemerintah provinsi Lampung.

## IV. GAMBARAN UMUM

### 4.1 Independensi Media Indonesia dan Kode Etik Jurnalistik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan fundamental bagi penguatan kebebasan pers dalam sistem demokrasi Indonesia. Regulasi ini disusun dalam konteks perubahan besar pascareformasi yang menuntut adanya perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi. UU Pers menegaskan posisi pers sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, sekaligus menempatkannya dalam kerangka demokrasi yang berkeadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan kerangka tersebut, undang-undang ini berperan tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang mengarahkan pers agar menjalankan fungsinya secara bebas, bertanggung jawab, dan profesional dalam kehidupan bernegara (Mailin dkk., 2022).

Fungsi-fungsi media telah di atur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) UU Pers (Mailin dkk., 2022):

1. Fungsi Informasi: Fungsi ini menjadi aspek utama komunikasi massa, yang menekankan peran media dalam menyampaikan peristiwa dan fakta dari liputan wartawan kepada publik. Informasi berasal dari peristiwa besar maupun realitas sosial sehari-hari, juga iklan turut berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi.
2. Fungsi Edukasi: Isi berita, opini, dan laporan mendalam sering menyajikan nilai edukatif yang memperluas wawasan pembaca, sekaligus meningkatkan kecerdasan intelektual dan moral masyarakat.
3. Fungsi Hiburan: Dalam media elektronik, hiburan menjadi fungsi utama, sedangkan media cetak tetap menyertakan unsur hiburan seperti cerita bergambar, kolom humor, atau teka-teki silang. Konten hiburan mencakup berita selebritas, cerita fiksi, gaya hidup, film, dan musik, yang bertujuan memberi relaksasi sekaligus memenuhi kebutuhan psikologis masyarakat.

4. Fungsi Pengawasan (Kontrol Sosial): Media memiliki fungsi vital sebagai pengawas sosial dengan menyampaikan informasi penting bagi publik. Fungsi pengawasan ini terbagi menjadi dua: pengawasan peringatan (*warning surveillance*) dan pengawasan instrumental (*instrumental surveillance*). Dalam sistem demokrasi, media disebut sebagai pilar keempat (*the fourth estate*) karena mengawasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga memastikan akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi kebijakan serta kinerja pemerintah.

Sejalan dengan fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, praktik jurnalistik di Indonesia dijalankan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai pedoman moral dan profesional wartawan. Kode etik ini berfungsi memastikan bahwa kegiatan jurnalistik dilaksanakan secara bertanggung jawab serta mencerminkan komitmen pers terhadap independensi dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Secara substansial, Kode Etik Jurnalistik memuat prinsip-prinsip utama sebagai berikut (SastroAtmodjo, 2006):

1. Independensi dan objektivitas dalam proses peliputan dan pemberitaan.
2. Akurasi dan keberimbangan informasi.
3. Perlindungan terhadap narasumber dan penghormatan atas privasi.
4. Larangan menerima suap atau bentuk imbalan yang memengaruhi independensi.
5. Perlakuan adil terhadap semua pihak yang terkait dalam pemberitaan.
6. Kewajiban melakukan koreksi serta pemenuhan hak jawab.

Penguatan independensi media di Indonesia juga didukung oleh peran organisasi profesi wartawan, salah satunya Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI berperan dalam mendorong profesionalisme, menjaga kebebasan pers, serta meningkatkan kemampuan wartawan dalam mengelola informasi secara akurat dan bertanggung jawab, khususnya di tengah maraknya penyimpangan informasi seperti berita palsu dan informasi yang tidak terverifikasi. Melalui advokasi, pembekalan etika jurnalistik, dan penguatan kapasitas anggota, AJI

berkontribusi dalam memastikan praktik jurnalistik tetap berpijak pada prinsip akurasi, kredibilitas, dan kepentingan publik, sehingga independensi media tidak hanya dijamin secara normatif, tetapi juga dijaga melalui kesadaran profesional dan mekanisme kontrol internal di kalangan insan pers.

Dalam praktik jurnalistik, wartawan wajib berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan moral dan profesional dalam menjalankan tugasnya secara independen. Kode etik berfungsi menjaga kebebasan pers sekaligus melindungi hak publik atas informasi yang benar dan bertanggung jawab. Organisasi profesi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berperan penting dalam menegakkan standar etika, mencegah penyalahgunaan profesi, serta menjaga integritas dan profesionalisme jurnalis. Dengan demikian, penerapan kode etik menjadi instrumen utama dalam memperkuat independensi media dan membangun kepercayaan publik terhadap praktik jurnalistik.

#### **4.2 Profil Radar Lampung Media Grup**

Radar Lampung merupakan sebuah surat kabar harian yang beroperasi di Provinsi Lampung dan menjadi bagian dari jaringan besar Jawa Pos Group. Perusahaan media ini resmi berdiri pada 11 Februari 1999. Sejak awal kehadirannya, Radar Lampung terus berkembang hingga pada usia satu dekade mampu menempatkan diri sebagai harian umum dengan oplah terbesar di Lampung, menjangkau pembaca di seluruh wilayah provinsi. Posisi ini menjadikan Radar Lampung sebagai salah satu unit usaha penting dari Jawa Pos Group yang berbasis di Jawa Timur.

# RADAR LAMPUNG

*Satu untuk Semua*

Gambar 2. Logo Radar Lampung Media Grup

*Sumber: Radar Lampung Media Grup*

Perkembangan perusahaan semakin tampak ketika memasuki tahun 2002. Pada periode ini, Radar Lampung Group mulai membangun gedung pusat operasionalnya, yakni Graha Pena Lampung. Pembangunan gedung tersebut menjadi tonggak penting karena seluruh pembiayaan ditanggung langsung oleh Radar Lampung Group, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi perusahaan yang baru berdiri dua tahun. Graha Pena Lampung kemudian menjadi kantor pusat yang berlokasi di Kota Bandar Lampung, tepatnya di Jl. Sultan Agung No. 18, Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Provinsi Lampung 35128.

Setelah menguatkan fondasi kelembagaannya, Radar Lampung Group mulai memperluas jangkauan bisnis pada tahun 2006. Upaya penetrasi pasar dilakukan secara lebih agresif dengan mendirikan berbagai cabang di sejumlah kabupaten di Provinsi Lampung. Beberapa cabang yang dibuka antara lain Radar Lampung Barat, Radar Lampung Tengah, Radar Tulang Bawang, Radar Tanggamus, dan Radar Lampung Selatan. Ekspansi ini mempertegas komitmen perusahaan untuk mendekatkan layanan informasi kepada masyarakat di daerah-daerah.

Radar Lampung terus memperluas kapasitas dan jangkauan layanan medianya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Seiring perkembangan perusahaan, struktur organisasinya kini terdiri atas beberapa divisi yang memiliki peran saling melengkapi dalam pelaksanaan fungsi media. Divisi-divisi tersebut mencakup Radar Lampung TV sebagai unit penyiaran televisi, RadarLampung.co.id sebagai platform media daring, Radar Lampung Surat

Kabar Harian sebagai lini cetak yang menjadi fondasi awal perusahaan, serta Radar Lampung Media Grup Research and Development (RLMG R&D) atau yang dikenal sebagai Radar Lampung Riset dan Data, yang berfokus pada pengolahan data, survei, dan penelitian untuk mendukung kualitas pemberitaan maupun evaluasi publik. Keberagaman divisi ini menunjukkan bahwa Radar Lampung berkembang menjadi media grup yang komprehensif, memadukan penyiaran, digital, cetak, dan riset dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

#### 4.2.1 Radar Lampung.co.id

PT Radar Lampung Online merupakan unit usaha media digital yang berada di bawah naungan Radar Lampung Media Group, jaringan media terkemuka di Provinsi Lampung. Keberadaan media ini diperkuat melalui operasional situs [www.radarlampung.co.id](http://www.radarlampung.co.id) yang menjadi pusat penyebaran informasi berbasis internet. Sebagai bagian dari ekosistem media yang berafiliasi dengan Surat Kabar Harian Radar Lampung, portal ini berfungsi sebagai kanal berita online yang menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan dapat dipercaya oleh masyarakat Lampung maupun pembaca di tingkat nasional.



Gambar 3. Logo Radar Lampung.co.id

*Sumber: Radar Lampung Media Grup*

Konten yang disajikan mencakup berbagai bidang, mulai dari isu lokal di Provinsi Lampung, perkembangan nasional, hingga informasi internasional. Ragam liputannya meliputi topik politik, ekonomi, pendidikan, hiburan, olahraga, gaya hidup, teknologi, serta dinamika sosial lainnya. Komitmen terhadap akurasi, kecepatan, dan independensi pemberitaan menjadi dasar kinerja redaksional Radarlampung.co.id.

Portal ini menempatkan diri sebagai salah satu sumber informasi yang kredibel, sekaligus berperan sebagai mitra strategis lembaga pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam penyebaran berbagai program dan informasi publik. Selain menyediakan layanan berita, platform ini juga menawarkan fasilitas promosi dan publikasi digital yang meliputi iklan produk, jasa, serta penyebaran berbagai kegiatan yang membutuhkan jangkauan audiens yang relevan dan efektif.

Reputasi Radarlampung.co.id dapat dilihat dari capaian statistik pembacanya. Berdasarkan data Google Analytics, portal ini memperoleh total 21.137.530 *pageviews* dalam periode Januari 2018 hingga Desember 2021, angka yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap konten yang disajikan. Dalam aktivitas sehari-hari, situs ini mencatat 50.000 hingga 100.000 kunjungan, menjadikannya salah satu media lokal dengan trafik tertinggi di Provinsi Lampung. Dengan pencapaian tersebut, Radarlampung.co.id menjadi sarana penting bagi penyebaran informasi instansi pemerintah, lembaga swasta, maupun publik secara umum.

Selain memperkuat layanan melalui situs web, PT Radar Lampung Online juga memperluas jangkauan dan interaksi dengan masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Hingga tahun 2025, akun Instagram @radarlampungonline telah diikuti lebih dari 14.400 pengguna. Sementara itu, *fanpage* Facebook dengan nama Radar Lampung Online (@radarlampung) memiliki 50.000 pengikut, kanal YouTube Radar Lampung News Streaming memiliki lebih dari 5.650 subscriber, dan akun X (Twitter) @radarlampung telah menjangkau 17,8 ribu pengikut. Selain itu, kehadiran media ini juga terlihat melalui platform TikTok @radarlampungonline, akun thread di Kaskus dengan ID @radar.lampung, serta akun publikasi di Pinterest dan LinkedIn dengan nama Radar Lampung Online.

Adapun visi, misi dan komitmen yang diangkat sebagai berikut:

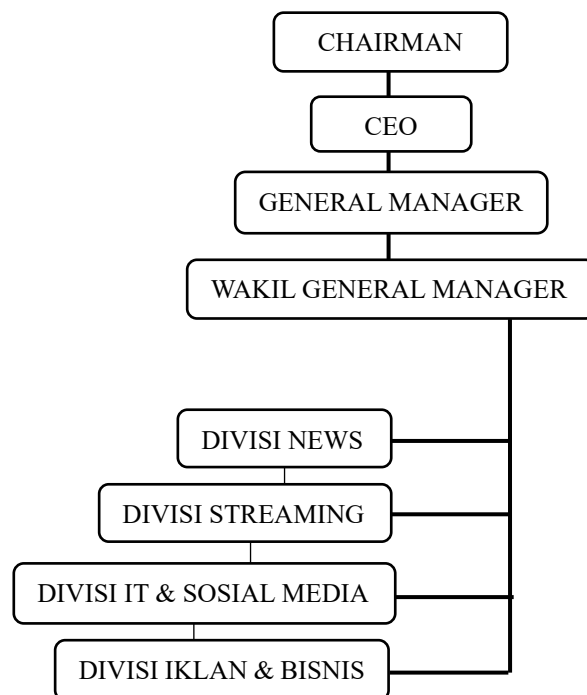
### **Visi**

Menjadi media online terdepan dan terpercaya di Provinsi Lampung, serta berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat melalui informasi yang objektif, akurat, dan berimbang.

### **Misi**

1. Menyajikan informasi aktual dan faktual dengan berlandaskan prinsip-prinsip jurnalisisme profesional.
2. Mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan akurasi dalam setiap pemberitaan.
3. Menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyebaran informasi positif.
4. Mengembangkan layanan digital inovatif agar penyebaran informasi semakin luas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
5. Menghadirkan konten yang inspiratif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat Lampung dan Indonesia.

### Susunan Redaksi



Gambar 4. Susunan Redaksi Radar Lampung co.id

*Sumber: Radar Lampung Media Grup*

#### 4.2.2 Radar Lampung TV

Radar Lampung TV merupakan salah satu stasiun televisi lokal yang hadir dan berkembang di Provinsi Lampung dengan mengungkap kedekatan terhadap masyarakat sebagai basis utama penyiarannya. Sejak awal berdirinya, Radar Lampung TV menempatkan diri sebagai media yang tidak hanya menayangkan informasi dan hiburan, tetapi juga menjaga interaksi langsung dengan khalayak melalui berbagai kegiatan off-air yang rutin diselenggarakan. Upaya ini sejalan dengan moto khususnya, yakni “*Mattep Nihan*”, yang dalam filosofi Lampung mencerminkan sikap lugas, tegas, serta jujur dalam menyampaikan pesan.

Sebagai bagian dari jaringan Jawa Pos Group, Radar Lampung TV memiliki posisi yang strategis dalam memperkuat keberadaan media lokal di daerah. Legalitas operasionalnya diperoleh dari Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), dengan izin resmi siaran yang dikeluarkan sejak 18 Desember 2008. Sejak saat itu, Radar Lampung TV menayangkan program siarannya melalui kanal 48 UHF, dengan jadwal penyiaran reguler yang dimulai pukul 05.00 WIB hingga 23.30 WIB setiap harinya.

Salah satu kekuatan utama Radar Lampung TV terletak pada jangkauan siarannya yang luas. Hal ini didukung oleh penggunaan tower pemancar berkekuatan 5 kilowatt (Kw), sehingga sinyal penyiaran mampu menembus hingga ke pelosok daerah di seluruh Provinsi Lampung. Lokasi pemancar ini berada di Pegunungan Betung, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, yang memiliki ketinggian sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan pemancar Radar Lampung TV sebagai salah satu yang tertinggi di antara stasiun televisi lain di Lampung, sehingga kualitas siaran lebih stabil dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat di berbagai kabupaten/kota.

Dalam hal karakteristik, Radar Lampung TV dikenal sebagai stasiun televisi yang dinamis, berjiwa kultural, serta memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Lampung. Hal ini tercermin dari fanatisme terhadap nilai budaya lokal, solidaritas yang kuat antarwarga, gaya penyampaian yang lugas dan ekspresif, serta semangat keingintahuan yang tinggi dalam mengeksplorasi isu-isu aktual. Nilai-nilai tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk program siaran yang berorientasi pada kearifan lokal, dengan menghadirkan masyarakat bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai bagian dari konten acara yang ditampilkan. Program Radar Lampung TV kerap disajikan secara

interaktif bahkan live, sehingga publik dapat terlibat langsung dalam penyampaian informasi maupun hiburan.

Dalam strategi penjadwalan siaran (*scheduling*), Radar Lampung TV menerapkan sejumlah pertimbangan profesional yang berfokus pada kebutuhan dan kebiasaan pemirsa. Pertimbangan tersebut mencakup pola menonton masyarakat (*viewing habit*), segmentasi audiens yang dituju, tingkat kompetisi dengan program dari stasiun televisi lain, serta ketersediaan dan kekuatan konten yang dimiliki. Dengan memanfaatkan transmitter 5 Kw dan memadukan strategi penyusunan program yang adaptif, Radar Lampung TV berhasil menempatkan diri sebagai televisi lokal dengan jangkauan siaran terluas di Lampung sekaligus tetap relevan dengan kebutuhan informasi, politik, pemerintahan, budaya, dan isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat.



Gambar 5. Logo Radar Lampung TV

*Sumber: Radar Lampung Media Grup*

### **Visi Misi Radar Lampung TV**

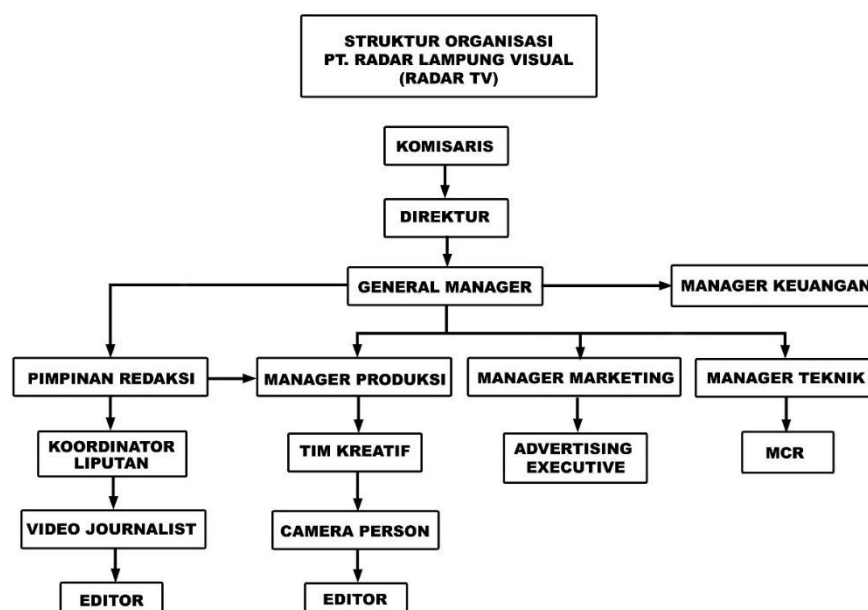
Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pers lokal, Radar Lampung TV memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman. Adapun visi Radar Lampung TV adalah “*Menjadi Media Televisi Lokal Terdepan, Akurat, dan Terlengkap*” Visi ini bermakna bahwa Radar Lampung TV bertekad menjadi media utama masyarakat Lampung dengan penyajian informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya. “Terdepan” berarti selalu aktual dan mengikuti perkembangan

zaman, “Akurat” menekankan pentingnya kebenaran fakta, sementara “Terlengkap” menunjukkan keberagaman informasi dan program yang disajikan.

Sementara itu, misi Radar Lampung TV dirumuskan untuk mendukung tercapainya visi tersebut. Adapun misi Radar Lampung Media Grup meliputi:

1. Menjadi rujukan informasi pendidikan dan kebudayaan.
2. Memberikan pengetahuan dan hiburan yang sehat.
3. Menyajikan berita dan program siaran yang berkualitas, aktual, faktual, dan berimbang.
4. Menjunjung tinggi *customer satisfaction* (kepuasan pemirsa).

#### Struktur Organisasi Radar Lampung TV



Gambar 6. Struktur Organisasi Radar Lampung TV

*Sumber: Radar Lampung Media Grup*

### **Program-Program Instansi**

Radar Lampung TV menghadirkan berbagai program berita dan dialog yang disusun secara terjadwal, dengan tujuan memberikan informasi yang akurat, aktual, serta dekat dengan kebutuhan masyarakat Lampung. Program-program tersebut antara lain:

#### **1. Program Berita Harian**

- a. Radar Malam – tayang setiap hari pukul 21.00 WIB.
- b. Radar Sore – tayang Senin hingga Sabtu pukul 16.30 WIB.
- c. Radar Pagi – tayang Senin hingga Sabtu pukul 07.00 WIB,
- d. Radar Siang – tayang Senin hingga Sabtu pukul 12.30 WIB,
- e. Radar Sepekan – program berita berbahasa daerah Lampung yang merangkum berbagai isu penting selama satu minggu.
- f. Bukan Fatamorgana – program features yang menghadirkan berita ringan, kisah inspiratif, dan fenomena menarik di masyarakat.

#### **2. Program Dialog dan Talkshow**

- a. Halo Lampung – talkshow interaktif yang mengangkat isu sosial, budaya, dan pemerintahan.
- b. ABDM (Anda Bertanya Dokter Menjawab) – program dialog kesehatan yang memberikan edukasi serta solusi medis kepada masyarakat.
- c. Gaspool – talkshow santai dengan format diskusi ringan, menghibur, sekaligus informatif.

#### **3. Media Online**

Radar Lampung TV juga aktif mengelola Radar TV News Online, yaitu portal berita yang memuat artikel-artikel aktual mengenai politik, pemerintahan, hukum, sosial, budaya, hingga hiburan.

#### **4.2.3 Radar Lampung Surat Kabar Harian**

SKH (Surat Kabar Harian) Radar Lampung merupakan salah satu surat kabar harian di Provinsi Lampung, diterbitkan oleh PT Wahana Semesta Lampung. Sebagai bagian dari jaringan besar Jawa Pos Group, kehadiran

Radar Lampung dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Lampung yang memiliki potensi untuk pemasaran surat kabar, Memiliki jangkauan jaringan yang sangat luas serta ditopang oleh teknologi informasi modern yang terintegrasi dalam sistem JPNN (Jawa Pos News Network), mempunyai mesin percetakan surat kabar serta sumber daya yang memadai. Faktor-faktor inilah yang membuat Lampung menjadi wilayah yang sangat strategis bagi ekspansi industri media, sehingga Jawa Pos memutuskan untuk membangun media harian di provinsi ini.

Radar Lampung resmi terbit pertama kali pada 2 Februari 2000, dengan distribusi awal yang mencakup 2 kota dan 13 kabupaten, yaitu Bandarlampung, Metro, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, Waykanan, serta Pesisir Barat. Pada masa awal penerbitannya, koran ini hanya memiliki tiras sekitar 2.000 eksemplar per hari dengan harga Rp700 per eksemplar. Namun, perkembangan perusahaan berlangsung sangat cepat. Dalam beberapa tahun, oplah meningkat secara signifikan hingga mencapai rata-rata 25.000–30.000 eksemplar per hari dengan harga Rp5.000 per eksemplar, menjadikannya surat kabar dengan jangkauan distribusi dan oplah terbesar di Lampung.

Memasuki tahun 2002, Radar Lampung Group menunjukkan kapasitas finansial dan manajerial yang kuat dengan membangun Graha Pena Lampung secara mandiri. Dua tahun kemudian, perusahaan kembali melakukan lompatan besar dengan menghadirkan mesin cetak berteknologi tinggi yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat. Mesin ini merupakan perangkat tercanggih pertama di luar Pulau Jawa pada saat itu dan mampu mencetak hingga 35.000 eksemplar koran per jam. Dukungan infrastruktur modern ini tidak hanya meningkatkan

kapasitas produksi tetapi juga memastikan kualitas cetak yang lebih baik dan distribusi yang lebih cepat ke seluruh daerah.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan berita daerah yang lebih dekat dan spesifik, Radar Lampung Group memperluas jaringannya pada tahun 2006 dengan membuka sejumlah unit koran daerah, seperti Radar Lampung Barat, Radar Lampung Tengah, Radar Tulang Bawang, Radar Tanggamus, dan Radar Lampung Selatan. Perluasan ini memperkuat penetrasi pasar sekaligus membuat Radar Lampung menjadi pelopor koran lokal yang hadir hingga tingkat kabupaten dengan sistem cetak jarak jauh yang terintegrasi. Jaringan distribusi ini didukung oleh teknologi modern dan terhubung erat dengan Jawa Pos National Network (JPNN), membentuk sistem informasi yang dapat memperbarui berita dari seluruh penjuru Lampung secara *real time*.

Capaian tersebut diperkuat dengan berbagai penghargaan bergengsi. Radar Lampung pernah mencatatkan rekor MURI sebagai “Koran Terbanyak Dibaca Pelajar” pada 2009, meraih Best Brand Award 2012 sebagai media dengan layanan terbaik di Sumatera, serta memperoleh Silver Winner kategori The Best of Sumatera Newspaper pada 2014. Pada tahun yang sama, Radar Lampung kembali menorehkan sejarah dengan MURI sebagai “Koran Tertebal di Indonesia” setelah menerbitkan edisi hingga 140 halaman pada 3 Februari 2014. Media ini juga mengantongi Young Rider Award 2014 untuk kualitas rubrik anak muda terbaik, dan pada tahun 2022 ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai “Koran Terbaik se-Sumatera” dengan prestasi Silver Winner IPMA. Seluruh keberhasilan ini merupakan hasil kerja profesional di bawah kepemimpinan Direktur Utama Ardiansyah, yang dibangun melalui dedikasi seluruh SDM dari berbagai divisi.

Perkembangan SKH Radar Lampung tidak hanya ditandai oleh peningkatan oplah dan kualitas pemberitaan, tetapi juga oleh penguatan

organisasi internal melalui berbagai divisi yang berperan dalam mendukung layanan kepada pembaca dan mitra.

1. Divisi Umum bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja di Graha Pena Lampung;
2. Divisi Iklan memastikan kepuasan klien dalam mempromosikan usahanya;
3. Divisi Keuangan menyediakan kemudahan transaksi; Divisi Redaksi mengelola penyajian berita yang akurat, aktual, dan berimbang;
4. Divisi Pemasaran menjamin distribusi koran tiba lebih cepat ke tangan agen, pelanggan, dan pembaca.

Sinergi seluruh divisi inilah yang memperkuat posisi Radar Lampung sebagai media utama masyarakat Lampung.

Sebagai media yang lahir dari kebutuhan akan ketersebaran informasi hingga pelosok daerah, Radar Lampung memanfaatkan sistem cetak jarak jauh berbasis teknologi modern yang menghubungkan berbagai kota di Lampung. Jaringan ini memungkinkan distribusi koran ke daerah-daerah baru yang terus berkembang, sekaligus membangun basis data dan direktori pemberitaan yang sangat luas. Dengan dukungan teknologi sindikasi berita Jawa Pos National Network (JPNN), Radar Lampung memiliki kemampuan untuk menyajikan berita real-time dari seluruh penjuru provinsi. Sistem jaringan media ini mencakup berbagai koran lokal yang berhasil memimpin pasar masing-masing wilayah, seperti Radar Lampung, Rakyat Lampung, Radar Lamsel, Radar Tuba, Radar Tanggamus, Radar Lambar, Radar Kotabumi, Radar Lamteng, Radar Metro, dan Trans Lampung.

Radar Lampung hadir dengan format 32 halaman yang memuat berbagai rubrik, di antaranya Berita Utama, Metropolis, Lampung Raya (yang mencakup wilayah Lamteng–Metro, Tanggamus–Pesawaran, Lambar–Waykanan, Lamtim–Lamsel, Lampungura–Tuba, Tuba Barat–Mesuji, dan Pringsewu), serta rubrik Politika, Metro Bisnis, Pendidikan, Society,

Nasional, Olahraga, Entertainment, X-Presi, dan Opini. Dengan harga Rp4.000 per eksemplar, SKH Radar Lampung tetap menjadi salah satu surat kabar paling kompetitif dan diminati oleh pembaca setia media cetak di Provinsi Lampung.

Dalam rangka memperluas jaringan bisnis, Radar Lampung Group terus mengembangkan unit usaha baru selama lebih dari dua dekade. Hingga tahun 2023, perusahaan ini telah mendirikan sepuluh media cetak tambahan, seperti Lampung News Paper, Trans Lampung, Senator, Radar Lamsel, Radar Tanggamus, Radar Tuba, Radar Lamteng, Radar Metro, Radar Kotabumi, dan Radar Lambar.

#### **4.2.4 Radar Lampung Riset dan Data**

Sebagai media terbesar di Provinsi Lampung, Radar Lampung Media Grup terus memperluas perannya tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai lembaga yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Penguatan tersebut diwujudkan melalui pendirian unit baru bernama *Radar Lampung Media Grup Research and Development (RLMG R&D)* atau yang lebih dikenal dengan *Radar Lampung Riset dan Data*. Unit ini resmi dibentuk pada 11 Juni 2024 melalui rapat pimpinan bersama seluruh karyawan Radar Lampung Media Grup, sebagai langkah strategis untuk memperluas fungsi perusahaan dalam ranah riset, survei, dan pengukuran opini publik.

RLMG R&D merupakan anak perusahaan terbaru Radar Lampung Media Grup yang secara khusus bergerak di bidang survei sosial, penelitian opini publik, dan pengolahan data strategis. Lembaga ini dipimpin oleh Abdul Karim, sebagai Direktur, yang juga memiliki pengalaman panjang dalam dunia media dan penelitian. Dalam struktur pengawasannya, RLMG R&D berada di bawah naungan Komisaris Ardiansyah, serta Direktur Utama Radar Lampung Media Grup Purna

Wirawan, S.E., M.M., yang berperan sebagai dewan pengarah. Selain itu, lembaga ini turut mendapat supervisi dan dukungan pengetahuan dari Direktur Eksekutif Disway Research, Romy Jaya, sehingga memperkuat kapasitas metodologis dan profesionalitas lembaga dalam menyelenggarakan riset.

Secara umum, Radar Lampung Riset dan Data memiliki mandat untuk melakukan survei atas isu-isu yang menjadi kepentingan publik. Fokusnya tidak terbatas pada survei elektoral seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), tetapi mencakup penilaian kepuasan publik terhadap pelayanan berbagai instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN, maupun sektor swasta. Kehadiran lembaga ini memberikan ruang bagi masyarakat maupun pekerja dalam suatu instansi untuk menyampaikan penilaian terhadap kualitas kinerja para pemimpin dan unit kerja. Dengan demikian, hasil survei tidak hanya berfungsi sebagai bahan evaluasi internal instansi, tetapi juga memperkuat mekanisme kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik.

RLMG R&D juga menjalankan peran strategis sebagai jembatan antara opini publik dengan pengambil kebijakan. Melalui publikasi hasil temuan survei secara terbuka di platform media massa milik Radar Lampung Media Grup baik koran, media online, maupun televisi, masyarakat dapat mengetahui tingkat kepuasan publik terhadap berbagai layanan. Keterbukaan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, mendorong perbaikan kinerja instansi, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Sejak berdiri, Radar Lampung Riset dan Data telah menghasilkan sejumlah karya riset yang berdampak luas. Beberapa di antaranya meliputi survei kepuasan masyarakat atas kinerja Polda Lampung, survei persepsi publik terhadap Kejaksaan Tinggi Lampung, survei kepuasan publik terhadap kepala daerah di tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota se-Lampung, serta survei popularitas dan elektabilitas kandidat bakal calon Gubernur Lampung. Kehadiran berbagai riset ini menunjukkan keseriusan lembaga dalam menyediakan data yang kredibel, akurat, dan bermanfaat bagi publik serta bagi instansi yang dievaluasi.

Melalui kombinasi antara profesionalitas media dan kapabilitas riset, Radar Lampung Riset dan Data kini menjadi salah satu institusi strategis dalam mendukung akuntabilitas publik di Lampung. Lembaga ini tidak hanya memperkuat posisi Radar Lampung sebagai media besar, tetapi juga memperluas perannya sebagai institusi yang turut berkontribusi pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berbasis data.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Radar Lampung Media Grup dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan tingkat independensi yang belum optimal jika ditinjau berdasarkan prinsip independensi media menurut McQuail. Seluruh divisi RadarLampung.co.id, Radar Lampung Surat Kabar Harian, Radar Lampung TV, serta Radar Lampung Riset dan Data menyatakan upaya sistematis untuk menjalankan independensi pemberitaan, baik melalui pemisahan antara opini dan fakta, mekanisme verifikasi berlapis, maupun penerapan standar editorial dalam setiap proses produksi berita hingga survei. Namun tingkat independensi media oleh Radar Lampung Media Grup, belum optimal karena pemberitaan masih didominasi informatif dan sebagian mengandung sensasionalisme.

Temuan penelitian untuk setiap indikator McQuail dapat dirangkum sebagai berikut, dengan memaparkan bagaimana masing-masing indikator diterapkan oleh Radar Lampung Media Grup dalam pemberitaan terkait kinerja Pemerintah Provinsi Lampung selama periode penelitian:

1. Keberadaan Opini, ditunjukkan melalui pemisahan tegas antara opini dengan struktur rubrikasi, verifikasi berlapis, serta penerapan prinsip keberimbangan narasumber dan informasi dalam setiap pemberitaan.
2. Ketiadaan Personalisasi, upaya Radar Lampung menghindari pencitraan tokoh melalui penentuan isu berbasis kepentingan publik, pemisahan konten jurnalistik promotif, dan seleksi narasumber berdasarkan otoritas, serta objektivitas pemberitaan. Namun, pada aspek penilaian objektif terhadap program dan kebijakan pemerintah, ditemukan kekurangan berupa dominasi berita informatif dibanding berita kritis di seluruh divisi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa objektivitas dalam penilaian program belum

sepenuhnya kuat, karena ruang kritik terbatas dan tidak mendalami isu serta pola pemberitaan berpotensi lebih menonjolkan keberjalanan program pemerintah dibanding memberikan evaluasi kritis yang diperlukan dalam mendorong pelaksanaan akuntabilitas pemerintah provinsi.

3. Ketiadaan Sensasionalisme, upaya Radar Lampung dan menghinari sensasionalisme dilakukan melalui penyajian faktual-edukatif, bahasa lugas, judul sesuai isi tanpa *clickbait*, data berbasis angka, dan prinsip jurnalisme damai. Namun pada analisis teks berita, dari 234 berita akuntabilitas Pemerintah provinsi, terdapat 21 publikasi berita yang masih mengandung dramatisasi atau elemen emosional, menunjukkan perlunya konsistensi editorial untuk optimalisasi penuh dalam menjalankan ketiadaan sensasionalisme.
4. Ketiadaan Stereotip, diupayakan melalui pengawasan redaksional berlapis, keseimbangan narasumber, penggunaan bahasa yang netral, dan menghindari *clickbait*. Analisis berita menunjukkan pemberitaan Radar Lampung tentang Pemerintah Provinsi Lampung tidak menunjukkan praktik stereotip seperti pelabelan atau citra negatif terhadap individu/kelompok.
5. Ketiadaan *Juxtaposition* dan *Linkage*, Radar Lampung mencegah manipulasi makna melalui komitmen "porsi sama" dan penerapan *cover both sides* antar pihak dalam judul dan isi, proses editing narasi netral, serta data riset publik independen. Analisis konten tidak menemukan penyandingan fakta berbeda untuk menciptakan kontras dramatis atau narasi sepihak, menunjukkan independensi tinggi dalam penyusunan berita.
6. Akurasi, Radar Lampung menerapkan akurasi dan keberimbangan via verifikasi berlapis, sumber beragam, serta crosscheck data otoritatif. Hal ini terlihat dari tidak ada kesalahan substantif, hanya minor yang diralat cepat, tanpa dampak sosial signifikan, menegaskan fondasi independensi pengawasan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Radar Lampung Media Grup belum mampu memenuhi semua indikator independensi media, indikator ketiadaan personalisasi dan ketiadaan sensasionalisme belum

terpenuhi secara optimal. Hal ini terlihat dari pola pemberitaan yang lebih banyak berfokus pada capaian dan aktivitas pemerintah dibandingkan berita kritis. Jumlah berita informatif jauh lebih dominan dibandingkan berita yang mengangkat kritik atau sisi problematis dari kebijakan pemerintah. Serta terdapat berita yang masih bersifat sensasional, terlihat pada judul maupun isi berita.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat independensi Radar Lampung Media Grup belum optimal jika ditinjau dari indikator independensi media menurut McQuail yang belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian menemukan bahwa indikator ketiadaan personalisasi masih perlu diperkuat, karena dominasi pemberitaan yang bersifat informatif dibandingkan kritis menyebabkan pemberitaan cenderung berfokus pada aktivitas dan agenda pemerintah, sehingga ruang untuk kontrol publik dan pendalaman isu belum sepenuhnya optimal. Selain itu, pada indikator ketiadaan sensasionalisme juga masih ditemukan keterbatasan dalam sebagian pemberitaan, yang menunjukkan bahwa pengemasan informasi belum sepenuhnya terhindar dari kecenderungan dramatisasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, meskipun berbagai mekanisme independensi telah diterapkan, fungsi pengawasan media terhadap akuntabilitas pemerintah daerah belum sepenuhnya diwujudkan secara maksimal. Oleh karena itu, Radar Lampung perlu meningkatkan kepekaan terhadap persoalan publik dan memperluas porsi pemberitaan kritis dan mengurangi penggunaan kalimat sensasi pada berita, agar fungsi pengawasan berjalan lebih seimbang. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pemeliharaan kode etik, penyempurnaan standar editorial, serta peningkatan kapasitas jurnalis dalam verifikasi data, teknik investigasi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung objektivitas pemberitaan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan kajian diperluas dengan melibatkan media lokal lain di Provinsi Lampung sehingga diperoleh

perbandingan yang lebih komprehensif mengenai praktik independensi media dalam fungsi pengawasan. Pendekatan metodologis tambahan, seperti analisis isi mendalam atau observasi langsung proses kerja redaksi, juga dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika internal media. Selain itu, penelitian pada periode pemerintahan berikutnya penting dilakukan untuk melihat konsistensi independensi media dalam menghadapi perubahan politik daerah, sehingga gambaran peran media dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah dapat dilihat secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriza, M. N. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money Dan Pengawasan Terhadap Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020. *KINDAI*, 17(3), 438–445.
- Agustin, R., & Dwiningwarni, S. S. (2023). Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 280–286.
- Ahmad Salman Farid. (2023). Peran Media Massa Dalam Memoderasi Dialog Politik. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 151–161. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.343>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arief, M. (2025). *Bentuk Lembaga Survei, Bang Aca Amanahi Abdul Karim Direktur*. Radar Lampung. <https://radarlampung.bacakoran.co/read/8548/bentuk-lembaga-survei-bang-aca-amanahi-abdul-karim-direktur>
- Arischa, K. L., & Frinaldi, A. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). *Tanah Pilih*, 3(1), 11–18.
- Azkie, M. A. M. A. M., Adiba, M., & Imansari, N. G. (2023). *Analisis Reportase Media Massa di Era Digital: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya pada Pandangan Khalayak*.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Christianto, I. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(5), 615–626.
- Dominick, J. R. (2006). *The Dynamics of Mass Communications: Media in the Digital Age*. McGraw-Hill Higher Education. <https://books.google.co.id/books?id=01DrwgEACAAJ>
- Efendi, E., Nasution, M. H., Purba, U. H., Az-zahra, S. F., Ritonga, K., & Reindra, K. (2023). Peran Pers Dalam Membangun Negara Dan Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8156–8170. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APeran>
- Gsnlampungid. (2025). *Lampung Masuk 10 Besar Daerah dengan Kasus Korupsi Terbanyak, BPKP Beberkan Akar Masalahnya*. <https://gsnlampung.id/lampung-masuk-10-besar-daerah-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-bpkp-beberkan-akar-masalahnya/>
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1),

11–26.

- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kushartiningih, R., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , 10(3), 1–18.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Professional*, 11(2), 585–592.
- Lutpiani, E. (2021). Implementasi Demokrasi di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–13.
- Maflucha, L. (2024). Etika Jurnalistik Dalam Era Digital: Menghadapi Tantangan Dengan Kode Etik Pers. *Jma*, 2(1), 109–124.
- Mailin, M., Rambe, G., Ar-Ridho, A., & Candra, C. (2022). Teori media/teori difusi inovasi. *JGK (Jurnal Guru Kita)*, 6(2), 168.
- Mauni, C. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 104–115.
- Mcquail, D. (1992). *Media Performance Mass Communication and the Public Interest*. SAGE Publications.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mega Octavia, dkk. (2022). Analisis Independensi pada Media Online Beritajatim.com Terhadap Pemberitaan di Wilayah Kabupaten Magetan Edisi Bulan November 2021 – Maret 2022. *Jurnal Content*, 1(1), 69–84. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/content/article/view/7663/2754>
- Muklis, M. (2024). Peran Media Massa dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1).
- Nasution, I., & Dianto, I. (2023). Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi. *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1(1), 90–107.
- Pers, D. (2014). Mengungkap Independensi Media. *Jurnal Dewan Pers Edisi No. 09*.
- Poentarie, E. (2015). BAHASA SENSASIONAL DALAM PEMBERITAAN MEDIA (SENSATIONAL LANGUAGE IN MEDIA REPORTING). *Widyaparwa*, 43(2), 103–114.
- Putra, J. A. M., Permata, D., Djani, A. I. P., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidispliner*, 3(02), 1239–1251. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/754>
- Rachma, S. A. (2025). *Digital News Report 2025: Kepercayaan Masyarakat ke Media di Indonesia Naik*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/digital-news-report-2025-kepercayaan-masyarakat-ke-media-di-indonesia-naik-432312-mvk.html?page=3>
- Rani, O., & Lestari, D. (2017). *QUALITY NEWS DAN POPULAR NEWS SEBAGAI TREND PEMBERITAAN MEDIA ONLINE ( Studi Deskriptif Kualitatif Trend Pemberitaan Quality News dan Popular News pada Media Online Nasional*

- di Indonesia Periode 2016* ). 83–94.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- SastroAtmodjo, S. (2006). *Kode etik jurnalistik*.
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Supriyanto, D., Nuryanti, & Noegroho, A. (2024). Media Sosial dalam Efektivitas Komunikasi Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 7796–7810.
- Wasistha, C. H. (2025). The Role Of Mass Media In Building An Anti-Corruption Culture In Society: Peran Media Massa Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi di Masyarakat. *Journal Ius Constitutum*, 1(2), 49–63.
- Yuningsih, Y., Rustandi, R., Aulia, B., Fuadah, H. H., & Ramdani, S. I. (2023). Analisis Isi Berita Sejarah Ka'bah di Media Massa Serambinews.com. *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.15575/mjhu.v2i1.26552>